

IMPLEMENTASI *BLUE ECONOMY*
DI DAERAH WISATA PANTAI MUTIARA TRENGGALEK
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

SKRIPSI



Oleh:

Oksahidha Ulil Restyoningtyas

NIM 401200265

EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Restyoningtyas, Oksahidha Ulil. Implementasi Blue Economy di Daerah Wisata Pantai Mutiara Trenggalek Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi. 2024. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Negeri Ponorogo, Pembimbing: Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I.

Kata Kunci: *Blue economy* dan Ekonomi Islam

Blue economy adalah konsep pembangunan yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam implementasi *blue economy* di Pantai Mutiara Trenggalek masih ada beberapa kendala yang menghambat keberhasilan tujuan dari *blue economy* itu sendiri.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi *blue economy*, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi *blue economy* dan dampak implementasi *blue economy* terhadap pertumbuhan ekonomi kelautan di daerah wisata Pantai Mutiara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *blue economy* di Pantai Mutiara berjalan baik sesuai prinsip *blue economy* dan konsep islam. Faktor sosial, ekonomi, lingkungan dan kebijakan sangat mempengaruhi terhadap implmentasi *blue economy* di Pantai Mutiara dan Implementasi *blue economy* di Pantai Mutiara berdampak positif terhadap lingkungan sekitar, kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wisata.

Saran untuk peneliti selanjutnya untuk mendukung penggunaan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan dalam pengelolaan sumber daya laut serta inovasi dalam produk yang dihasilkan. Agar implementasi *blue economy* dapat berjalan maksimal dan tujuan *blue economy* dapat tercapai.

LEMBAR PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa proposal skripsi atas nama :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1	Oksahidha Ulil Restyoningtyas	401200265	Ekonomi Syariah	Implementasi <i>Blue economy</i> di Daerah Wisata Pantai Mutiara Trenggalek Perspektif Ekonomi Islam

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 14 November 2024

Mengetahui,
 Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I.
 NIP. 197801122006041002

Menyetujui,

Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I.
 NIP 197801122006041002

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Implementasi *Blue Economy* di Daerah Wisata Pantai Mutiara
Trenggalek Perspektif Ekonomi Islam

Nama : Oksahidha Ulil Restyoningtyas

NIM : 401200265

Judul : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang Ujian Skripsi oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang

Dr. Aji Damanuri, M.E.I.

NIP 197506022002121003

Penguji I

Dr. H. Didiek Noeryono Basar, MM., MH.

NIP 197310101998031001

Penguji II

Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag., M.E.I.

NIP 197801122006041002

(.....)

(.....)

(.....)

Ponorogo, 26 November 2024

Mengesahkan,

Dekan FEB IAIN Ponorogo

Prof. Dr. H. Luthfi-Hadi Aminuddin, M. Ag.

NIP 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oksahidha Ulil Restyoningtya
NIM : 401200265
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Implementasi *Blue Economy* di Daerah Wisata Pantai Mutiara
Trenggalek Perspektif Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan disahkan dosen pembimbing. Selanjutnya penulis bersedia naskah ini dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di <https://etheses.iainponorogo.ac.id>. Adapun isi seluruh tulisan ini seperlunya menjadi tanggung jawab penulis.

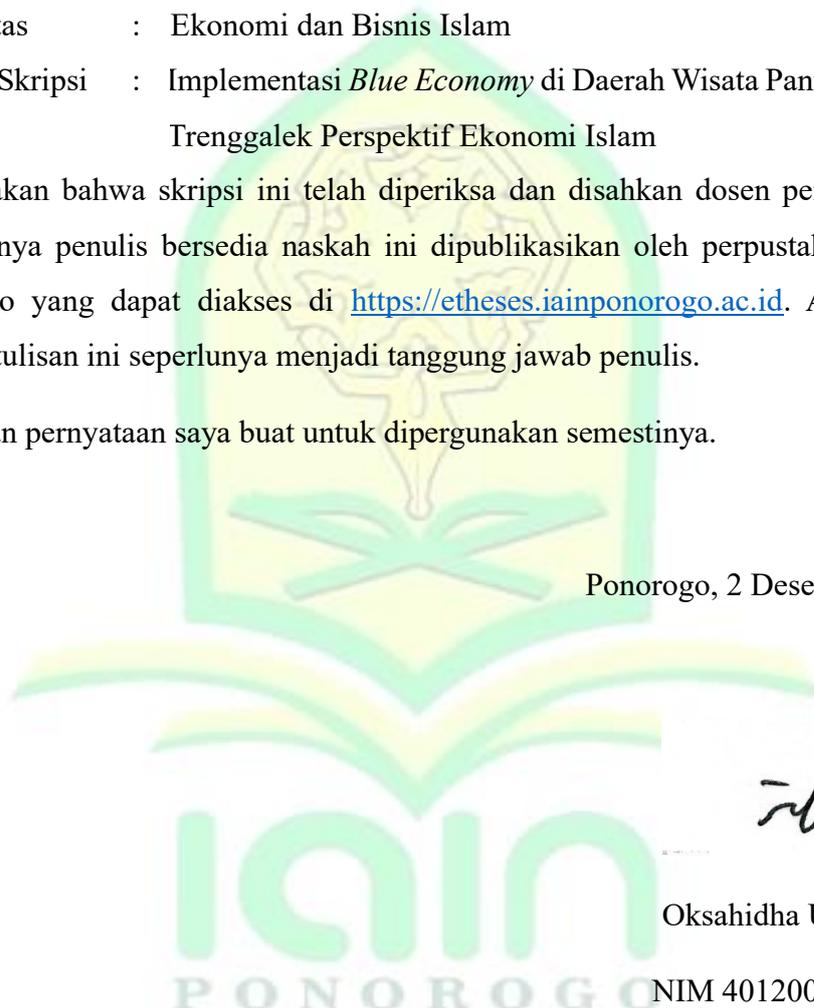
Demikian pernyataan saya buat untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 2 Desember 2024



Oksahidha Ulil R

NIM 401200265



KEASLIAN TULISAN**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DATA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Oksahidha Ulil Restyoningtyas
Tempat/Tanggal Lahir : Ponorogo, 16 Oktober 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki (Perempuan)
NIM : 401200265
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data yang saya tulis pada surat pernyataan ini dan yang saya isikan di laman e-wisuda benar-benar telah sesuai dengan data Akta Kelahiran dan ijazah terakhir (MA/SMA/SMK/Paket C) serta setuju digunakan sebagai acuan penulisan ijazah S1/S2 oleh pihak IAIN Ponorogo

Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dari data tersebut, saya siap bertanggungjawab sesuai peraturan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan

Ponorogo, 28 - 11 - 2024
Yang membuat pernyataan



Oksahidha Ulil Restyoningtyas

*) coret yang tidak perlu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang sangat melimpah. Hal tersebut menjadi modal utama untuk menggerakkan roda pembangunan negara. Dalam era global saat ini pembangunan menjadi hal yang penting untuk pengembangan suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah selaku peran utama dalam menggerakkan pembangunan suatu daerah memiliki peran dalam mengeksplorasi potensi atau sumber kekuatan bagi meningkatnya perekonomian suatu daerah.¹ Pertumbuhan ekonomi dan investasi juga dapat meningkatkan kesempatan kerja dengan asumsi jika banyak investasi di suatu daerah maka akan menyerap tenaga kerja sehingga peningkatan produktivitas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.² Negara tidak dapat berkembang secara signifikan apabila daerah-daerah di Indonesia tidak memiliki kekuatan lokal yang ada. Kekuatan lokal atau kemampuan daerah salah satunya dapat dilihat dari industri pariwisatanya dan kualitas SDM. Secara geografis Indonesia berada di antara dua samudera dan dua benua dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Indonesia memiliki 17.499 pulau yang

¹ Harits Dwi Wiratma and Tanti Nurgiyanti, "Pembangunan Pariwisata Kulon Progo Melalui Konsep Green Economy Dan *Blue economy*," *Nation State Journal of International Studies* 2, no. 2 (2019): 161–72, <https://doi.org/10.24076/nsjis.2019v2i2.164>.

² Mohamad Nur Efendi et al., "Omnibus Law Sentiment and Its Impact on The Halal Certification Program in Indonesia," *Justicia Islamica* 20, no. 1 (2023): 37–58, <https://doi.org/10.21154/justicia.v20i1.5829>.

memanjang dari Sabang hingga Merauke serta luas wilayahnya mencapai 7,81 juta km² yang terbagi menjadi wilayah lautan sebesar 3,25 juta km². Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,55 km² dan sisanya sebesar 2,012 merupakan wilayah daratan.³ Dapat disimpulkan bahwasanya hampir 70% kawasan Indonesia terdiri dari lautan dan 30% daratan. Dengan wilayah laut Indonesia yang sangat luas membuat Indonesia memiliki potensi besar dalam industri kelautan.

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang terkenal dengan wisata pantainya yang indah. Sisi selatan Trenggalek berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Kabupaten Trenggalek termasuk kawasan pesisir selatan Pulau Jawa. Dilihat dari luas wilayahnya, Kabupaten Trenggalek sendiri memiliki luas wilayah sekitar 1.261,40 km².⁴ Sedangkan luas laut 4 mil dari daratan adalah 711,68 km². Sebagian wilayah daratannya terdiri dari tanah pengunungan dengan luas 2/3 bagian luas wilayahnya. Sedangkan sisanya (1/3 bagian) merupakan dataran rendah. Ketinggian tanahnya diantara 0 hingga 690 meter di atas permukaan laut.⁵ Dari sekian pantai yang ada di Trenggalek ada salah satu pantai yang berpotensi sebagai *patron* pantai-pantai yang lain dalam menerapkan *blue economy* yaitu Pantai Mutiara. Pantai

³ Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam et al., "Implementasi *Blue economy* Di Wilayah Pesisir Kenjeran Surabaya," *OECOMICUS Journal of Economics* 7, no. 2 (2023).

⁴ bps trenggalek, "Letak Geografis Kabupaten Trenggalek," n.d., <https://trenggalekkab.bps.go.id/statictable/2020/01/30/365/keadaan-geografis-dan-batas-administrasi-wilayah-kabupaten-trenggalek-2017.html>.

⁵ BPK Jawa Timur, "," 2023, <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-trenggalek/>.

Mutiara adalah salah satu pantai yang berada di Kabupaten Trenggalek. Pantai ini lebih tepatnya terletak pada Dusun Karanggongso RT 37 RW 06 Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Lokasi Pantai Mutiara terletak 5,2 km dari pantai Prigi dengan waktu tempuh 15 menit menggunakan motor. Sedangkan dari Pusat Kota Trenggalek jaraknya sekitar 45 km, dengan waktu tempuh 1 jam 27 menit menggunakan motor. Pantai Mutiara ini menjadi sorotan wisatawan sekitar dengan keindahan pantainya dan perawatan pantai yang sangat mendukung. Pantai ini dikelola mandiri oleh Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). Untuk menyiapkan masuk ke era *blue economy* Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Trenggalek juga ikut memberikan upaya pengembangan *blue economy* seperti rumah ikan, terumbu karang, kapal ekowisata bahari, alat selam, alat konservasi penyu dan sarana budidaya biota laut dan lain-lain.⁶ Dengan adanya bantuan yang diberikan Pemprov Jatim untuk pengembangan *blue economy* adalah salah satu bentuk *support* pemerintah terhadap pengembangan *blue economy* agar dapat menunjang perekonomian umat.

Menurut Gunter Pauli di dalam bukunya "*The Blue economy*" beliau mengedepankan *blue economy* dengan berlandaskan tiga pilar yaitu pilar ekosistem, ekonomi dan sosial.⁷ Sebelumnya negara Indonesia sendiri

⁶ "Pantai Mutiara Ditarget Masuk *Blue economy*," accessed September 19, 2023, <https://harian.disway.id/read/686014/pantai-mutiara-ditarget-masuk-blue-economy>.

⁷ Gunter Pauli, *Blue economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs* (United States: paradigm publication, 2010).

sudah tidak asing dengan konsep *green economy* yang mana, konsep *green economy* atau kegiatan ekonomi hijau cenderung mengolah hasil alam yang ada di darat, baik hutan hasil bumi, kebun, dan lain-lain. Mengingat potensi Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia, hal ini memunculkan prinsip baru yaitu ekonomi biru. Ekonomi biru berorientasi pada kegiatan ekonomi dengan melestarikan perairan, kelautan dan ekosistem pesisir. Konsep ekonomi biru adalah mengendalikan dan mengelola hasil laut, hasil perairan, memelihara ekosistem di perairan, lautan, dan wilayah pesisir serta pemanfaatan sumber daya laut yang memperhatikan keberlangsungannya. Konsep *blue economy* dirasa mampu mensinergikan kebijakan ekonomi, sistem investasi, infrastruktur, dan bisnis dapat bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan peningkatan produktivitas. Ekonomi biru berpotensi menjadi tolak ukur pembangunan perikanan dan mengembangkan energi terbarukan lepas pantai, dekarbonisasi transportasi laut, serta penghijauan pelabuhan untuk kesejahteraan umat. yang menekankan pada pemanfaatan sumber daya alam dengan berpegang pada pola efisiensi alam, namun dapat menghasilkan barang yang lebih bernilai, berwawasan sosial, dan bebas sampah maupun limbah.⁸Bahkan ekonomi biru mampu mengatasi permasalahan ekonomi dan pemborosan. Oleh karena itu jika hanya mengandalkan *green economy* saja tidak cukup untuk

⁸ Eni, "MODEL COMPONENTS OF MANGROVE RESOURCES MANAGEMENT BASED ON *BLUE ECONOMY* CONCEPT," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 04, no. Mi (1967): 5–24.

mengembangkan industri atau pariwisata yang dapat menunjang perekonomian negara, tapi perlu dibersamai juga dengan konsep *Blue economy*.⁹

Blue economy juga terikat erat dengan SDGs (*Sustainable Development Goals*) lebih tepatnya pada SGD 14 yang memiliki tujuan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Penggunaan pendekatan konsep *blue economy* sebagai model pembangunan kelautan nasional diharapkan mampu menjawab ketergantungan antara ekonomi dan ekosistem serta dampak negatif akibat aktivitas ekonomi termasuk perubahan iklim dan pemanasan global. Keberhasilan dari ekonomi biru seperti pencapaian industrialisasi sektor kelautan selain dihadapkan pada kebutuhan tenaga kerja dan teknologi yang memadai, juga memerlukan terobosan-terobosan, seperti perbaikan rantai hulu hingga hilir guna meningkatkan daya saingnya. Industrialisasi kelautan dalam konsep ekonomi biru didorong untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, modernisasi sistem produksi hulu dan hilir, penguatan pelaku industri, berbasis komoditas utama, wilayah dan sistem manajemen, pembangunan berkelanjutan serta transformasi sosial. Pembangunan ekonomi kelautan dengan model ekonomi biru diharapkan dapat menjamin keberlanjutan ketersediaan sumberdaya, keseimbangan ekosistem dan kesehatan

⁹ Gina Sonya Adriadi, Mansur Afifi, and Baiq Saripta W. M, "Pengembangan Kegiatan Ekonomi Berbasis *Blue economy* Di Kawasan Pesisir Kek Mandalika," *Jurnal Konstanta* 1, no. 1 (2022): 1–10, <https://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/konstanta/article/view/160>.

lingkungan, serta mendorong pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang efektif agar dapat menunjang perekonomian dan kesejahteraan umat.¹⁰ Selain itu dengan pendekatan ekonomi biru juga, pembangunan ekonomi kelautan diharapkan mampu menjadi motor pembangunan nasional dan sumber pertumbuhan baru. Ekonomi biru tidak hanya diharapkan dapat memacu pembangunan berkelanjutan, tetapi juga dapat menjaga kesehatan lingkungan melalui perekonomian rendah karbon (*low carbon economy*).

Dalam implementasinya kawasan Pantai Mutiara sudah menerapkan *blue economy* dengan berdasarkan lima prinsip *blue economy*. Pertama, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam yang diwujudkan dengan penanaman terumbu karang menggunakan batok kelapa atau biasa disebut dengan metode bioreeftef. Kedua, *zero waste* (tanpa limbah) diwujudkan dengan pembuatan terumbu karang dari limbah kerang. Ketiga, inklusivitas sosial dan penciptaan lapangan kerja diwujudkan dengan adanya perubahan mata pencaharian yang sebelumnya hanya nelayan sekarang menjadi beragam seperti pemilik warung makan dengan berbagai olahan ikan, penyewa *speedboat* dan adanya POKDARWIS untuk pengembangan pengelolaan pantai. Keempat, sistem produksi siklus dapat dibuktikan dengan adanya beberapa rumah makan di sekitar pantai yang menjadi tujuan pengunjung, penginapan di sekitar pantai, dan

¹⁰ Jurnal Transnasional, "Motivasi Indonesia Dalam Menerapkan Model Kebijakan" 7, no. 1 (2015): 1914–28.

konservasi terumbu karang sebagai tempat tinggal biota laut. Kelima, inovasi dan adaptasi terbuka dapat diwujudkan dengan peningkatan kualitas dari fasilitas sekitar daerah pariwisata Pantai Mutiara Trenggalek seperti ada spot foto dan ayunan selain itu juga menyebar luaskan informasi pantai melalui media sosial dengan mudah untuk menarik pelanggan.

Meskipun Pantai Mutiara sudah menerapkan *blue economy* dalam pengelolaan pantainya tetapi pada realita di lapangan masih sering terjadi pelanggaran pada daerah kawasan Pantai Mutiara, seperti meracuni ikan yang dilakukan oleh para nelayan sekitar dan para pengunjung pantai yang kurang merawat lingkungan pantai dengan membuang sampah sembarangan disekitar pantai. Tidak hanya pelanggaran yang disebabkan oleh manusia tetapi dulu terumbu karang di Pantai Mutiara juga pernah mengalami pemutihan akibat pemanasan global serta kerusakan praktik seperti penggunaan potas, bom perangkap ikan. Jika hal tersebut terus dilakukan terus menerus dan tidak ada upaya penanganan yang serius dari pihak pemerintah, maka dikhawatirkan akan terjadi kelangkaan sumber daya alam hayati dikawasan Pantai Mutiara Trenggalek dan kerusakan ekosistem laut yang sangat parah. Serta akan terjadi konflik yang tak terkendali di daerah pantai tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas oleh karena itu diperlukannya penelitian lebih lanjut bagi peneliti agar dapat mengkaji dan menganalisis implementasi pengembangan *blue economy* pada daerah kelautan guna menunjang perekonomian ummat, khususnya di daerah pariwisata Pantai

Mutiara Kabupaten Trenggalek yang sangat berpotensi untuk mengembangkan *blue economy*. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab kesuksesan dari penerapan *blue economy* sebagai alternatif memaksimalkan industri perikanan dan juga perawatan ekosistem laut di daerah wisata Pantai Mutiara Trenggalek.

B. Rumusan Masalah

Implementasi *blue economy* di Indonesia bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Seiring dengan potensi yang dimiliki oleh Pantai Mutiara Trenggalek, Implementasi *blue economy* di kawasan ini perlu dikaji lebih lanjut. Maka dari itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi *blue economy* di daerah wisata Pantai Mutiara Trenggalek?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi *blue economy* di daerah wisata Pantai Mutiara Trenggalek?
3. Bagaimana dampak implementasi *blue economy* terhadap pertumbuhan ekonomi kelautan?

C. Tujuan Penelitian

Adanya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi *blue economy* di daerah pariwisata Pantai Mutiara.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi

implementasi *blue economy* di daerah wisata Pantai Mutiara Trenggalek.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak implementasi *blue economy* terhadap pertumbuhan ekonomi kelautan di daerah wisata Pantai Mutiara.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap bisa dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan terutama bagi ilmu ekonomi syariah dan juga menjadi bahan literatur terkait pentingnya implementasi *blue economy* perspektif ekonomi Islam untuk mengembangkan daerah kelautan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi IAIN Ponorogo

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan tambahan referensi dan informasi bagi civitas akademika IAIN Ponorogo, khususnya bagi mahasiswa Ekonomi Syariah yang erat kaitannya dengan masalah ekonomi.

- b. Bagi instansi atau lembaga terkait pengelolaan pariwisata di Kabupaten Trenggalek.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan referensi bagi instansi atau lembaga terkait yang berhubungan dengan pengelolaan pariwisata, terutama dalam implementasi *blue economy* sehingga tujuan program bisa tercapai.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Pengembangan *blue economy* merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam mewujudkan lingkungan maritim yang dapat mensejahterakan masyarakat agar dapat mewujudkan salah satu dari tujuan SDGs. Penelitian tentang *blue economy* dengan berbagai metode penelitian telah banyak dilakukan. Begitu juga, sudah banyak penelitian yang mengkolaborasikan antara *blue economy* dengan pemberdayaan usaha ataupun lingkungan tertentu. Sementara, penelitian yang menggunakan *blue economy* sebagai konsep pengembangan wilayah pantai sebagai tujuan pariwisata masih belum banyak yang melakukan.

Dalam penelitian yang sudah dilakukan banyak dari peneliti yang sudah membahas tentang pengembangan *blue economy* sebagai pemberdayaan usaha atau lingkungan seperti pengembangan udang galah.¹¹ Pengembangan industri perikanan di Indonesia.¹² Penerapan *blue economy* di kawasan Kek Mandalika.¹³ Pengembangan perikanan di wilayah

¹¹ Sudirman Adibrata, Rahmad Lingga, and Mohammad Agung Nugraha, "Penerapan Blue Economy Dengan Budidaya Udang Vaname (*Litopenaeus Vannamei*)," *Journal of Tropical Marine Science* 5, no. 1 (2022): 45–54, <https://doi.org/10.33019/jour.trop.mar.sci.v5i1.2964>.

¹² Adriadi, Afifi, and M, "Pengembangan Kegiatan Ekonomi Berbasis *Blue economy* Di Kawasan Pesisir Kek Mandalika."

¹³ Adriadi, Afifi, and M.

Kabupaten Luwu.¹⁴ Pengembangan agroindustri perikanan laut di kawasan pesisir Muncar.¹⁵ Selain itu ada juga yang membahas terkait pengembangan kualitas garam di daerah Jawa Timur dan penerapan konsep *blue economy* di daerah Madura bagian Sapeke.¹⁶ Beberapa peneliti tersebut di antaranya tulisan Adibrata, Rahmad dan Siti Fatimah, Gina Sonya, Nurul Hartati dan Nurdiana, Roudlotul Badiah, Wiwik Handayani dan Ika korika, Ichwan Hariyanto.

Sementara itu banyak juga peneliti yang mengaitkan *blue economy* dengan SDGs seperti penelitian dilakukan oleh Mir'atul hayati dan Fernaldi Anggadha di mana dalam penelitiannya penulis membahas tentang sisi positif pengembangan *blue economy* dan *green economy* yang signifikan dengan SDGs.¹⁷ Selain itu juga penelitian dari Ki-Hoon Le, Junsung Noh dan Joeng Seong Khim yang mengaitkan *blue economy* dengan SDG 14-17.¹⁸ Selanjutnya ada juga penelitian dari Eny Lathifah yang membahas

¹⁴ Nurul Hartati, "DALAM MENDUKUNG *BLUE ECONOMY* DI KABUPATEN LUWU TIMUR (Studi Kasus Masyarakat Pesisir Kecamatan Malili) DI KABUPATEN LUWU TIMUR (Studi Kasus Masyarakat Pesisir Kecamatan Malili)," 2023.

¹⁵ Nurdiana, "Strategi Pengembangan Agroindustri Perikanan Laut Di Kawasan Pesisir Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi (Pendekatan Konsep *Blue economy*)," *Digital Repository Universitas Jember*, no. September 2019 (2021): 2019–22.

¹⁶ Alumni Program and Studi Hubungan, "PROSES KERJASAMA INTERNASIONAL ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN PEMERINTAH PERANCIS UTARA DALAM MENERAPKAN KONSEP ' *BLUE ECONOMY* ' DI KAWASAN MADURA KABUPATEN SAPEKE Ichwan Haryanto" 3, no. 1 (2015): 13–31.

¹⁷ Mir'atul Hayati and Fernaldi Anggadha Ratno, "The Urgency of Blue and Green Economy, Internalization, and Infrastructure, In The SDGS," *Annual International Conference on Islamic Economics and Business (AICIEB)* 3 (2023): 105–17.

¹⁸ Ki Hoon Lee, Junsung Noh, and Jong Seong Khim, "The *Blue economy* and the United Nations' Sustainable Development Goals: Challenges and Opportunities," *Environment International* 137, no. January (2020): 105528, <https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105528>.

terkait *green economy* dan *blue economy* menggunakan konsep *Fiqh al Bi'ah*.¹⁹

Dari penelitian yang sudah dilakukan ada beberapa peneliti yang membahas terkait inovasi dan kreatifitas untuk pengembangan *blue economy* seperti dalam penelitiannya Khoirun Nisak yang membahas terkait pengembangan *blue economy* menggunakan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dengan pendekatan *fiqh al- bi'ah*.²⁰ Shofiyah dan Lailatul Azizah yang membahas tentang pengembangan *blue economy* pada daerah TPI Brondong dengan cara penangan ikan yang baik (CPIB), penangkapan ikan terukur, sampai mengganti alat tangkap dari cantrang menjadi jalatong sehingga ekosistem terjaga.²¹ Hal ini juga dilakukan oleh Ardhina Dian Islamiati, Sitti Hasana dan Fuad Mahfud dengan hasil penelitian mengenai implementasi kosep *blue economy* dengan di Indonesia dengan memanfaatkan tekhnologi *BIG DATA*.²² Selain itu dalam penelitiannya Norra Morra Banu memebahas terkait konsep *blue economy* terhadap pembangunan ekonomi indonesia dengan menggunakan konsep minapolitan.²³

¹⁹ Eny Latifah, “*Fiqh Al-Bi’ah and the Concept of Green and Blue economy for Achieving Sustainable Development in the Context of SDGs*,” *Invest Journal of Sharia & Economic Law* 4, no. 1 (2024): 74–99, <https://doi.org/10.21154/invest.v4i1.7732>.

²⁰ Khoirun Nisak, “Cash Waqf Linked Blue Sukuk: An Analysis of *Fiqh Al-Biah*,” *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 5 (2023): 163–68.

²¹ Lailatul Azizah, “Implementasi Blue Economy Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada TPI Brondong)” 06, no. September (2023): 101–22.

²² Ardhina Dian et al., “Implementasi Konsep Blue Economy Di Indonesia Dengan,” *Sensistek* 6, no. 2 (2023): 134–40.

²³ Nota Morra Banu, “Konsep Blue Economy Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Indonesia,” *Ekonis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 22, no. 1 (2020): 27–31, <https://doi.org/10.30811/ekonis.v22i1.1907>.

Selain itu ada juga peneliti yang membahas tentang analisis sektor perikanan sebelum dan sesudah adanya kebijakan *blue economy* yang dilakukan oleh Larasati Widyaningrum dan Atik Maratis Suhartini dan Lerasati Sukarniati, Rifki Khoirudin yang meneliti tentang kelembagan penerapan konsep *blue economy* pada tambak udang di daerah Bantul.²⁴ Selain itu juga ada penelitian yang membahas tentang keuntungan dan tantangan dalam implementasi *blue economy* penelitian ini dilakukan oleh Sahil Narwal, Manpreet Kaur, Digvijay Singh dan Felix Bast.²⁵

Sementara itu juga banyak dari peneliti yang melakukan penelitian tentang *blue economy* dengan menggunakan perspektif Islam maupun ekonomi Islam. Seperti pengembangan *blue economy* menggunakan analisis *Maqashid Syariah* yang dilakukan oleh Fiki Andrean Yahya dan Nashrulloh.²⁶ Selain itu juga ada yang menganalisis *blue economy* menggunakan perspektif ekonomi Islam seperti dalam penelitian Fahrurrozi.²⁷ Lalu ada juga yang mengkaji sektor perikanan menggunakan perspektif ekonomi syariah seperti yang dilakukan oleh Reo Zaputra.²⁸

²⁴ Lestari Sukarniati and Rifki Khoirudin, "Analisis Kelembagaan Penerapan Konsep *Blue economy* Pada Tambak Udang (Studi Kasus Di Dusun Ngentak Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul)," *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo* 3, no. 2 (2017): 52–65, <https://doi.org/10.35906/jep01.v3i2.198>.

²⁵ Sahil Narwal et al., "Sustainable *Blue economy*: Opportunities and Challenges," *Journal of Biosciences* 49, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.1007/s12038-023-00375-x>.

Fiki Andrean Yahya and Nasrulloh, "The Relevance of Maqashid Sharia in Green Economy (Study of Coastal Tourism Area Mangrove Park Labuhan, Bangkalan-Madura)," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum* ... 8, no. 2 (2022): 12–22, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/731%0Ahttps://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/download/731/601>.

²⁷ Fahrurrozi Fahrurrozi, "Analysis Concept of The *Blue economy* Islamic Perspective (Case Studi Jumiang as Marine Tourism in Pamekasan)," *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal* 4, no. 1 (2020): 17, <https://doi.org/10.21070/perisai.v4i1.435>.

²⁸ Reo Zaputra, "KAJIAN PENGEMBANGAN SEKTOR PERIKANAN DI KABUPATEN SAMPAS" 1, no. 5 (2023): 728–37.

Selain itu ada penelitian dari Yundari Amelia, Ismah Rustam dan Purnami Safitri yang membahas terkait implementasi kebijakan pemerintah Indonesia dengan FAO mengenai unit pengelolaan ikan di Lombok.²⁹ Terakhir ada penelitian dari Urwatil Adzin, Muhammad Sayuti dan Laili Hurriati tentang implementasi *blue economy* di wilayah pesisir Ampenan Kota Mataram.³⁰

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan masih minimnya implementasi *blue economy* dengan menggunakan perspektif Ekonomi Islam. Dengan penelitian seperti ini akan menjadi formula baru dalam mengimplementasikan *blue economy* di daerah wisata Pantai Mutiara Kabupaten Trenggalek

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai dan jenis data yang diperlukan maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung yang dilakukan di lapangan atau kepada responden. Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Skripsi ini dianalisis dengan melakukan reduksi data sesuai pertanyaan penelitian, data disajikan sedemikian rupa

²⁹ Yundari Amelia Chandra, "Implementasi Kebijakan Berbasis Blue Economy Dalam Kerangka Kerja Sama Pemerintah Indonesia Dengan Food And Agriculture Organization (Fao): Studi Mengenai Unit Pengolahan Ikan (UPI) Di Kabupaten Lombok Utara," *Indonesian Journal of Global Discourse* 3, no. 1 (2021): 1–19, <https://doi.org/10.29303/ijgd.v3i1.27>.

³⁰ La Adzin, Urwatil, Muhammad sayuti and Ili Hurriyati, "Implementasi Blue Economy Di Wilayah Pesisir Ampenan Kecamatan Ampenan Kota Mataram," n.d., 85–90.

sehingga memudahkan untuk memahami, dan diakhiri dengan menyimpulkan jawaban sesuai pembahasan dalam pembahasan.³¹

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa teknik statistik. Penelitian kualitatif lebih menekankan kealamiah data, sehingga tidak ada pengkondisian tertentu pada objek, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci dalam mendapatkan data. Datanya berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati, pendekatan yang digunakan bersifat induktif dan hasil lebih menekankan makna. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori. Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif adalah untuk mengetahui kondisi, karakteristik, maupun definisi tertentu. Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk mencari informasi terkait bagaimana Implementasi *Blue economy* di Daerah Wisata Pantai Mutiara Trenggalek perspektif Ekonomi Islam.³²

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat disekitar daerah pariwisata Pantai Mutiara Kabupaten Trenggalek. Penulis memilih lokasi tersebut

³¹ Amin Wahyudi, Binti Nur Asiyah, and Husnul Haq, "The Urgency of Sharia Division in Indonesian and Malaysian Islamic Bank," *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics* 7, no. 1 (2023): 82–94, <https://doi.org/10.26740/aluqud.v7n1.p82-94>.

³² M Toha Anggor, "Metode Penelitian," *Jakarta: Universitas Terbuka*, 2008.

dikarenakan Pantai Mutiara adalah pantai baru yang sudah menerapkan *blue economy dengan baik*. maka dari itu penulis ingin mengetahui lebih dalam dan menganalisis apakah *blue economy* yang diterapkan di Pantai Mutiara ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dan sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam.

3. Data dan Sumber Data

Data adalah fakta, informasi, atau keterangan yang merupakan bahan baku dalam penelitian yang digunakan sebagai bahan pemecahan masalah atau mengungkapkan suatu gejala.

a. Data

Data yang digunakan peneliti di antaranya:

1. Implementasi *blue economy* di daerah wisata Pantai Mutiara
2. Faktor- faktor yang mempengaruhi implementasi *blue economy* di daerah wisata Pantai Mutiara
3. Dampak implementasi *blue economy* terhadap pertumbuhan ekonomi kelautan

b. Sumber Data

Data tersebut didapatkan peneliti dari:

- 1) Tiga Pengelola Pantai Mutiara Kabupaten Trenggalek
- 2) Dua Pelaku usaha di daerah wisata Pantai Mutiara
- 3) Dua Masyarakat sekitar daerah wisata Pantai Mutiara
- 4) Satu orang Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek bidang tangkap

Data diatas merupakan sumber data primer dengan teknik pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti melalui sebuah pengamatan atau observasi, wawancara, serta dokumentasi secara langsung di lapangan. Data ini didapatkan dari hasil wawancara serta observasi di Pantai Mutiara Trenggalek.

Sumber lain dari sekunder merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis sumber data yang sudah ada. Data ini diperoleh dari orang lain sebagai data pelengkap penelitian yang akan peneliti dapatkan dari beberapa literatur atau buku.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Kelebihan metode observasi dibandingkan dengan metode survei adalah data yang dikumpulkan pada umumnya tidak terdistorsi, lebih akurat dan bebas dari response bias. Peneliti melakukan observasi dengan mengamati aktivitas yang dilakukan dan berkomunikasi dengan informan dengan melakukan observasi secara langsung terhadap objek penelitian dengan mengamati apa yang dikerjakan, mendengarkan apa yang diucapkan. Dalam hal ini peneliti datang

langsung ke lokasi daerah pariwisata Pantai Mutiara Kabupaten Trenggalek yang terlibat langsung dalam pengelolaannya.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik yang dilakukan guna mendapatkan hal-hal yang diteliti lebih mendalam dengan menginterpretasikan situasi dan fenomena yang ada, di mana hal tersebut tidak ditemukan dalam teknik observasi. Dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan pengelola lokasi wisata, pelaku usaha, masyarakat sekitar Pantai Mutiara serta melakukan diskusi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah rekam jejak masalah yang ditulis ataupun cetak dapat berupa foto, catatan anekdot, surat, buku harian dan dokumen lainnya. Dokumentasi ini menjadi unsur penting dalam tahap pengumpulan data sebab dokumentasi menjadi data pendukung atau penguat hasil observasi yang peneliti lakukan.

3. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data berasal dari data yang diperoleh dari hasil wawancara. Pengelolaan data bertujuan untuk membantu proses penelitian agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan, memecahkan masalah dan menjawab persoalan yang sedang dipertanyakan dalam penelitian. Sesuai dengan model Miles dan Huberman menyatakan

bahwa aktivitas dalam pengelolaan data dapat dilakukan dengan melalui beberapa langkah, sebagai berikut:

- a. Reduksi data, yaitu mencoba merangkum data dari hal-hal yang pokok dan penting serta terkait dengan topik penelitian.
- b. Penyajian data, yaitu data yang disajikan dalam bentuk tabel dan gambar, sehingga data tersebut dapat tersusun dalam pola hubungan atau saling keterkaitan dalam hal penarikan kesimpulan dan verifikasi data yang harus didukung dengan data yang valid dan konsisten sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.
- c. Penarikan kesimpulan, yaitu peneliti menarik kesimpulan data-data yang telah diperoleh dengan menggunakan metode induktif yang penarikan kesimpulan yang dinilai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan umum.³³

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang tidak penting, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Setelah data terkumpul baik dari penelitian maupun studi pustaka, maka data

³³ Prof.Dr.Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, 2021.

akan dianalisis menggunakan model analisis kualitatif yaitu penulis menggambarkan data yang terkumpul dengan menyusun kata-kata atau kalimat untuk memperoleh sebuah kesimpulan. Tahapan analisis kualitatif adalah setelah data terkumpul, lalu dianalisis dan kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang digunakan sehingga dapat terevaluasi. Setelah data terevaluasi maka akan didapatkan kesimpulan baru yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul.

Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar atau perilaku), dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Pemaparannya harus dilakukan secara objektif agar subjektivitas peneliti dalam membuat interpretasi dapat dihindarkan. Metode yang dipakai dalam mengumpulkan data adalah metode deskriptif analitik yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang Implementasi *blue economy* di daerah pariwisata Pantai Mutiara Trenggalek. Tujuan dari penelitian deskriptif analitik ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Metode penelitian deskriptif-kualitatif difokuskan pada permasalahan atas dasar fakta yang dilakukan dengan cara pengamatan atau observasi, wawancara, dan mempelajari dokumen-dokumen.

Dipilihnya metode ini sebagai salah satu metode penulisan guna memperoleh gambaran di lapangan dan Implementasi *blue economy* perspektif ekonomi Islam di daerah Pantai Mutiara Trenggalek.

5. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Setelah data terkumpul dan sebelum penulis menulis hasil penelitian, peneliti mencocokkan kembali data-data yang diperoleh dengan data yang telah didapat dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan data yang didapat dapat diuji keabsahannya dan dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengecekan keabsahan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data, sehingga dari teknik ini peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas dari data dengan teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan. Teknik pemeriksaan triangulasi yaitu dengan memanfaatkan penggunaan sumber data, pengumpulan data dan waktu.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan yang memiliki tujuan agar penelitian yang dilakukan dapat terarah, sistematis dan sesuai dengan bidang yang akan dikaji. Secara garis besar terdapat lima bab yang terkandung dalam penelitian ini, berikut penjelasan dari setiap bab:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang Masalah, Penegasan istilah (jika dibutuhkan), Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Studi Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI *BLUE ECONOMY* DAN KONSEP ISLAM

Teori yang ditulis pada bab ini adalah yang sesuai dengan rumusan masalah dan data yang akan dikaji. Artinya penggunaan teori mengikuti jumlah teori yang dibutuhkan. Penggunaan teori dalam penelitian kualitatif biasanya sebagai alat bantu memahami data dan bukan sebagai alat ukur. Karena logika analisis biasanya bersifat induktif.

BAB III PAPARAN DATA IMPLEMENTASI *BLUE ECONOMY* DI DAERAH WISATA PANTAI MUTIARA TRENGGALEK

Data dalam penelitian biasanya terdiri dari data inti dan pendukung. Data inti adalah data yang ditanyakan pada rumusan masalah, sedangkan pendukung adalah data selain data inti biasanya berupa pengantar.

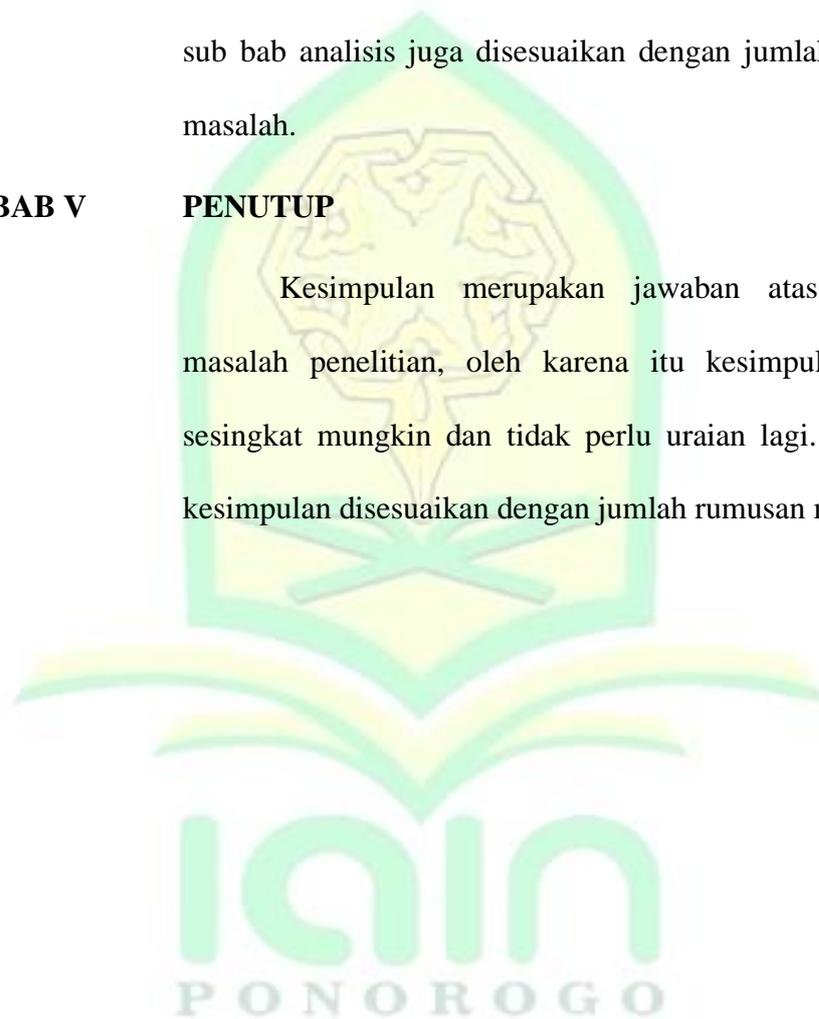
BAB IV PEMBAHASAN/ANALISIS DATA IMPLEMENTASI *BLUE ECONOMY* DI DAERAH WISATA PANTAI

MUTIARA TRENGGALEK PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Analisis merupakan proses penafsiran data menggunakan teori supaya dapat dipahami dalam rangka menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Penulisan sub bab analisis juga disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian, oleh karena itu kesimpulan ditulis sesingkat mungkin dan tidak perlu uraian lagi. Penulisan kesimpulan disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah.



BAB II

TEORI *BLUE ECONOMY* DAN EKONOMI ISLAM

A. Teori *Blue economy*

Di dalam bukunya "*The Blue economy*", Gunter Pauli mengedepankan ekonomi biru dengan tiga pilar yaitu ekosistem, ekonomi, dan sosial. Sebelum ini, Indonesia sendiri sudah terbiasa dengan konsep *green economy*. Kegiatan ekonomi hijau biasanya berfokus pada hasil alam yang ada di darat, seperti kebun dan hutan hasil bumi. Setelah melalui banyak perdebatan dengan berbagai negara akhirnya munculah ekonomi biru dengan alasan bahwa laut dan samudera sangat penting untuk bergerak menuju berkelanjutan, rendah karbon, sumber daya dan efisien dan pola pembangunan inklusif. Selain itu dengan mempertimbangkan kemungkinan Indonesia untuk menjadi negara maritim terbesar di dunia, muncul gagasan baru yang disebut "*blue economy*", yang berfokus menjaga kesejahteraan perairan, kelautan, dan lingkungan pesisir.

Menurut Bank Dunia, *blue economy* adalah penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian dan pekerjaan dengan tetap menjaga kesehatan ekosistem laut. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa ekonomi biru merupakan konsep yang berupaya mewujudkan keseimbangan antara dua aspek yang terkait dalam ekosistem kelautan yaitu ekologi dan ekonomi. Dengan kata lain, ekonomi biru tidak semata-mata melihat potensi kelautan sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sangat menekankan kepada vitalnya menjaga kelestarian lingkungan hidup di dalam ekosistem bahari.

Konsep ekonomi biru selain bermanfaat untuk menjaga kesehatan laut, juga akan dapat membuka peluang investasi, lapangan pekerjaan, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional karena distribusi pertumbuhan ekonomi perikanan cenderung ke daerah Indonesia Timur, sehingga juga meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah.³⁴ Menurut *Food Agriculture Organization of United Nations* menguraikan *blue economy* sebagai konsep yang menekankan pada perlindungan dan manajemen yang berkelanjutan, ekosistem laut yang sehat mampu menjadikan laut lebih produktif, dan ini merupakan mutlak harus ada bagi ekonomi yang berbasis kelautan.³⁵

Melihat potensi lautan Indonesia yang begitu besar, tentu pembangunan menggunakan konsep *blue economy* adalah salah satu faktornya. Menurut Susilo Bambang Yudhoyono dalam konsep *blue economy* dinilai tepat dalam menghadapi permasalahan kelautan seperti perubahan iklim serta selaras dengan pembangunan berkelanjutan dalam meminimalisir kemiskinan.³⁶ Pada dasarnya konsep *blue economy* menekankan pada tingkat kreativitas dan inovasi pelaku ekonomi dalam memajemen sumber daya seperti halnya pada efisiensi sistem produksi, variasi produk dan sebagainya. Ekologi, sosial dan ekonomi merupakan tiga faktor yang menjadi fokus dalam penerapan konsep *blue*

³⁴ Dhina Arriyana and Agustin Fadjaranie, "Studi Empiris Konsep Sistem Akuntansi Manajemen Strategis Untuk Mendukung Program *Blue economy* (Studi Kasus Program Satu Data Kementerian Kelautan Dan Perikanan)," *Jurnal Kelautan Nasional* 18, no. 1 (2023): 43, <https://doi.org/10.15578/jkn.v18i1.12369>.

³⁵ Lisa Nursita and Fakultas Tarbiyah, "Menggagas Pembangunan *Blue economy* Terumbu Karang ; Sebuah Pendekatan Sosial Ekonomi EcceS : Economics Social and Development Studies Abstrak : Menggagas Pembangunan *Blue economy* Terumbu Abstract : Initiating Development *Blue economy* of Coral Reef ;" 7 (2020): 62–86, <https://doi.org/10.24252/ecc.v7i1.13730>.

³⁶ Adibrata, Lingga, and Nugraha, "Penerapan *Blue economy* Dengan Budidaya Udang Vaname (*Litopenaeus Vannamei*)."

economy. *Blue economy* merupakan salah satu jalan keluar dari permasalahan lingkungan dan kemiskinan pada wilayah pesisir.³⁷

Konsep *blue economy* adalah bentuk dari SGD 14 karena SDG 14 berfokus pada pemanfaatan sumber daya kelautan tujuan ini menekankan pentingnya menjaga ekosistem laut yang mencakup keanekaragaman hayati serta mengatasi pencemaran, penangkapan ikan berlebih dan kerusakan habitat. SDG 14 bertujuan untuk memastikan bahwa lautan dapat memberikan manfaat bagi generasi mendatang melalui pengelolaan yang bijaksana dan berbasis ilmiah. Ini mencakup. Upaya konservasi, pengurangan polusi laut dan peningkatan keberlanjutan sektor perikanan. Dengan demikian SDG 14 menjadi kunci dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang seimbang antara ekonomi, sosial dan lingkungan.³⁸

Penerapan *blue economy* dapat ditinjau sebagai pengembangan ekonomi kerakyatan yang komprehensif dalam mencapai pembangunan nasional secara kompleks. Pendekatan pembangunan menggunakan konsep *blue economy* menggunakan *triple track strategy* yang terdiri dari:

- 1) Program Pro-Poor (pengentasan kemiskinan)
- 2) Pro-Growth (pertumbuhan)
- 3) Pro-Job (penyerapan pada tenaga kerja)

³⁷ Nurul Jannah Lailatul Fitria Siti Marwiyah, "The Urgency of *Blue economy*-Based Sustainable Development Education in Higher Education (Study *Blue economy* Education in Probolinggo)" 8, no. 3 (2022): 643–54.

³⁸ Karina Rahmah, Dompok Napitupulu, and Mirawati Yanita, "ANALISIS DAMPAK KEBUN KELAPA SAWIT TERHADAP SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) INDONESIA," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2022): 105–14, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.505>.

4) *Pro-Environment* (pelestarian lingkungan)

Dalam penerapan “*blue economy*” diperlukan langkah-langkah yang konkret agar perencanaan pembangunan nasional dapat tercapai. Langkah-langkah pendekatan yang dapat dilakukan di antaranya:

- 1) Memahami dengan jelas terkait nilai yang dimiliki ekosistem laut
- 2) Mengaitkan ekosistem laut dengan ketahanan pangan
- 3) Melakui transisi ekonomi yang berkaitan dengan industri, pasar, komunitas dalam pola pembangunan yang berkeadilan.

Selain menggunakan *triple track strategy*, proses implementasi *blue economy* dapat ditinjau dengan mengacu pada lima prinsip dan indikator *blue economy* di bawah ini.³⁹

Tabel 1.1 Prinsip dan indikator *blue economy*.⁴⁰

Prinsip-prinsip <i>economy</i>	konsep <i>Blue</i>	Indikator Konsep <i>Blue economy</i>
Efisiensi Alam		• Pemanfaatan serta penggunaan sumber daya alam yang efisien

³⁹ Agro Bangka Belitung et al., “*Abdimas Galuh IMPLEMENTATION OF BLUE ECONOMY BY MANAGING PRAWN POTENCY ON THE FRESHWATER THROUGH ASSISTING COMPARATIVE STUDY OF Usaha Mikro Kecil Menengah Strategic Trade Center Agromaritim (UMKM STC)*” 4, no. September (2022): 1140–51.

⁴⁰ Muhammad Na’afil Kamal Putra and Muhammad Farhan Asri, “Juridical Review of Blue Economy in Indonesia,” *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 3, no. 1 (2023): 123, <https://doi.org/10.19184/jkph.v3i1.37211>.

	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak menggunakan emisi bahan yang berbahaya • Tidak mengganggu serta tidak merusak ekosistem alam
Zero Waste	<ul style="list-style-type: none"> • Meminimalisir dan mengurangi adanya limbah yang diperoleh dari kegiatan ekonomi • Pengelolaan limbah menjadi produk baru yang lebih ekonomis • Berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan Pantai
Inklusivitas Sosial dan Peluang Lapangan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya program kemitraan di antara <i>masyarakat</i> • Pemberdayaan komunitas lokal • Penciptaan lapangan kerja
Keseimbangan antara produksi dan konsumsi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan pantai dengan memperhatikan keberlanjutan ekosistem

	<ul style="list-style-type: none"> • Edukasi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keseimbangan alam di sekitar Pantai • Memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang berjalan tidak merusak lingkungan
Inovasi dan adaptasi terbuka	<ul style="list-style-type: none"> • menciptakan solusi inovatif yang dapat meningkatkan keberlanjutan dan produktivitas sektor kelautan.⁴¹

1. Berbagai kebijakan tentang *blue economy*

Landasan hukum tentang *blue economy* ini sudah diatur dalam tataran tingkat pemerintahan pusat sampai daerah. Adapun landasan hukum tentang *blue economy* di antaranya:

a. UU RI NO 32 Tahun 2014

Dalam UU ini asas dan tujuan *blue economy* sesuai dengan Bab 2 pasal 2, yaitu:

1) Penyelenggaraan kelautan dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Keberlanjutan
2. Konsistensi
3. Keterpaduan

⁴¹ Kamal Putra and Asri.

4. Kepastian hukum
 5. Kemitraan
 6. Pemerataan
 7. Peran serta masyarakat
 8. Keterbukaan
 9. Desentralisasi
 10. Akuntabilitas dan
 11. Keadilan.
- b. Pada Bab 2 Pasal 3 Penyelenggara kelautan bertujuan untuk:
1. Menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim
 2. Mendayagunakan sumber daya kelautan dan/atau kegiatan di wilayah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara
 3. Mewujudkan laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruangjuang bangsa Indonesia
 4. Memanfaatkan sumber daya kelautan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang
 5. Memajukan budaya dan pengetahuan kelautan bagi masyarakat

6. Mengembangkan sumber daya manusia di bidang kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung pembangunan kelautan secara optimal dan terpadu;
7. Memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai Negara Kepulauan;
8. Mengembangkan peran Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam percaturan kelautan global sesuai dengan hukum laut Internasional untuk kepentingan bangsa dan negara.

c. Pada Bab 5 Pasal 14 dijelaskan bahwa:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengelolaan kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru.
2. Pemanfaatan sumber daya kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. Perikanan
 - b. Energi dan sumber daya mineral
 - c. Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil
 - d. Sumber daya nonkonvensional.

3. Pengusahaan Sumber Daya Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Industri Kelautan
 - b. Wisata Bahari
 - c. Perhubungan Laut
 - d. Bangunan Laut.
- d. Kebijakan Ekonomi Biru untuk kelautan dan perikanan berkelanjutan yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek bahwasannya:
- a. Memerluas kawasan konservasi laut
 - b. Penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota
 - c. Pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan
 - d. Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
 - e. Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.⁴²

B. Teori *Blue economy* dalam Islam

Secara letak geografis Indonesia merupakan negara maritim yang berpotensi dalam mengembangkan sumber daya alam kelautan. Oleh karena itu dalam pengelolaannya perlu kegiatan yang inovatif, kreatif dan dapat memikirkan keberlanjutan ekosistem. Adanya konsep *blue economy* sebagai inovasi dalam

⁴² Dinas Perikanan, "Kebijakan Ekonomi Biru," 2023.

mengelola sumber daya kelautan. Konsep *blue economy* adalah konsep kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam kelautan sebagai peningkatan ekonomi *masyarakat* yang diiringi dengan ekosistem laut yang tetap terjaga.

Konsep *blue economy* pengelolaan pesisir dan laut dapat dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan tanpa meninggalkan sampah atau limbah yang dapat merusak keindahan dan karakteristik pesisir. Karena dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa manusia pada dasarnya diciptakan untuk berfungsi sebagai khalifah di bumi, bertanggung jawab untuk mencegah kerusakan alam yang dibuat oleh manusia, seperti yang disebutkan dalam ayat 30 Surat Al-Baqarah, artinya: "*Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."*⁴³

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia diciptakan untuk memelihara bumi agar bumi meliputi daratan dan lautan tetap terpelihara keaneka ragaman hayatinya dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Melalui ayat Al-Qur'an pula Allah memerintahkan manusia untuk selalu memakmurkan bumi baik di daratan maupun dilautan sebagaimana dalam ayat QS. Huud ayat 61 disebutkan bahwa: Artinya: "*Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka*

⁴³ Al- Qur'an, 2:34.

*shaleh. Shaleh berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali- kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia Telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, Karena itu mohonlah ampunan-Nya, Kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).”*⁴⁴ Ayat di atas lebih mengaskan lagi bahwa hakikatnya manusia di muka bumi wajib memakmurkan bumi melalui kegiatan-kegiatan ekonomi seperti meningkatkan kegiatan pariwisata di pantai dengan konsep ekonomi biru agar lingkungan tetap terjaga bersih dan berkelanjutan sehingga sumber daya alam terus berkembang dengan baik.

Pemanfaatan sumber daya alam telah dijelaskan dalam al- Qur’an dalam firman Allah surah al-Baqoroh ayat 267 yaitu: *hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadap-Nya. dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.*⁴⁵ Ayat di atas menunjukkan bahwa sumber daya alam yang ada di bumi ini sangat baik apabila dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW yaitu: *“Manusia berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput (lahan), dan api (energi).”* (H.R. Abu Dawud). Hal ini membuktikan

⁴⁴ Al- Qur’an, 11:34.

⁴⁵ Al- Qur’an, 2:267.

bahwa padang rumput di daratan atau hutan, air di lautan merupakan kepemilikan umum yang tidak boleh dimiliki secara individu. Lahan yang luas (hutan) disamakan dengan air dan api atau energi (termasuk barang tambang) dalam sektor kepemilikan umum yang merupakan sumber daya alam yang bisa dikelola dengan baik oleh manusia untuk dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi seperti pengelolaan Pantai Mutiara Trenggalek dengan menggunakan konsep *blue economy* sebagai bentuk pengembangan ekonomi masyarakat pesisir dalam meningkatkan kehidupan ekonomi.

Dalam hal *Zero Waste* (tanpa limbah) Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa hidup harus bersih dan indah yaitu pada Q.S Al-Baqarah ayat 222 Artinya "*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.*"⁴⁶ Dalam hadist disebutkan bahwa: *Sesungguhnya Allah swt. Itu baik, Dia menyukai kebaikan. Allah itu bersih, Dia menyukai kebersihan. Allah itu mulia, Dia menyukai kemuliaan. Allah itu dermawan Ia menyukai kedermawanan maka bersihkanlah olehmu tempat-tempatmu.* (H.R. at-Tirmizi: 2723). Ayat dan hadist di atas menjelaskan bahwa sangat dianjurkan dalam Islam untuk bersih dari sampah bahkan ada pahala tersendiri bagi orang-orang yang selalu mencintai kebersihan.

Hal ini menunjukkan bahwa konsep *blue economy* sebenarnya sudah ada dalam Al-Qur'an termasuk dalam hal *social inclusive* dan penciptaan lapangan kerja Islam sudah menjelaskan hal tersebut dalam ayat Al-Qur'an: *Dan katakanlah: "bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang*

⁴⁶ Al- Qur'an, 2:222.

*mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*⁴⁷ Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam menganjurkan penciptaan lapangan kerja agar orang-orang dapat bekerja dengan baik agar perkembangan ekonomi menjadi tumbuh dan dapat mensejahterakan umat manusia seperti halnya di daerah pesisir Pantai Mutiara Trenggalek dengan adanya *marine tourism* maka akan lebih meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dengan peluang kerja yang ada.

Selanjutnya tentang keseimbangan antara produksi dan konsumsi yaitu Islam sangat mengajarkan kepada umat-Nya untuk hidup seimbang agar sesuai dengan porsi sehingga tidak terjadi pemborosan dalam hidup, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an tentang larangan pemborosan yaitu dalam surah al-Isro' ayat 27: *Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*⁴⁸ Ayat di atas sangatlah jelas bahwa konsep *blue economy* tentang keseimbangan antara produksi dan konsumsi ada dalam Al-Qur'an yang selalu mengajarkan manusia untuk bersikap seimbang dan tidak boros.

Pemanfaatan teknologi yang berasaskan hukum-hukum fisika sebagai upaya adaptasi dengan kondisi alam dan sumber daya lokal yang tersedia. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa teknologi mempunyai peran yang sangat penting seperti halnya manusia mempunyai keinginan untuk keliling

⁴⁷ Al- Qur'an, 9:105.

⁴⁸ Al- Qur'an, 17:27.

angkasa, maka manusia dianjurkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dalam Surat Al-Mulk Ayat 19, “*Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatup sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahan di (udara) selain Yang Maha Pemurah Dia Maha Melihat Segala Sesuatu.*”⁴⁹ Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa konsep *blue economy* sudah dijelaskan dalam Islam melalui Al-Qur’an dan Hadist Nabi karena Islam adalah agama yang *rahmatan lil al-amin*, yang mana semua aspek dalam kehidupan dibahas dan dijelaskan dalam Al-Qur’an.⁵⁰

C. Teori *Fiqh al-Bi’ah*

Hal ini juga tidak terlepas dari perkembangan *fiqh* kontemporer yaitu *Fiqh al Bi’ah*. *Fiqh al-bi’ah* merupakan bagian dari kajian *fiqh* yang mengkaji tentang lingkungan hidup dan pelestariannya. *Fiqh al-bi’ah* merupakan penelitian yang bertujuan untuk meminimalisir permasalahan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup dalam Islam dapat dilakukan dengan menghindari kerusakan lingkungan. *Fiqh al-bi’ah* dan penanganannya perlu diletakkan di atas suatu pondasi etika dan moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini meski ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup. *Fiqh* lingkungan menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dilepaskan dari

⁴⁹ Al- Qur’an, 67 :19.

⁵⁰ Fahrurrozi Fahrurrozi, “Analysis Concept of The Blue economy Islamic Perspective (Case Studi Jumiang as Marine Tourism in Pamekasan),” *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal* 4, no. 1 (2020): 17, <https://doi.org/10.21070/perisai.v4i1.435>.

tanggungjawab manusia yang beriman dan merupakan amanat dari Allah SWT untuk memelihara dan melindungi alam dari segala macam kerusakan dan pengrusakan yang berakibat mengancam hidup-nya sendiri.⁵¹ Ali Yafie, Pakar Hukum Islam Indonesia, mencoba menjelaskan prinsip-prinsip dasar kewajiban pemeliharaan lingkungan hidup dalam prespektif *fiqh*, yaitu antara lain:

1. Pemeliharaan jiwa, raga, kehormatan (*hifdh al-nafs*).

Kehidupan dalam pandangan *fiqh* adalah sesuatu yang mulia dan sangat berharga. Kehidupan merupakan modal dasar manusia untuk memenuhi fungsinya dan menentukan nilai dan martabatnya. Oleh karena itu, ajaran Islam memberikan banyak peringatan kepada manusia agar menggunakan modal dasar itu secermat dan semaksimal mungkin.⁵²

2. Kehidupan dunia bukan tujuan. Kehidupan dunia adalah sarana (*wasilah*) dalam berprestasi guna menggapai rida Allah SWT. hingga menuju kehidupan akhirat yang kekal.

3. Produksi dan konsumsi harus sesuai dengan standar kebutuhan layak manusia (*hadd al-kifayah*).⁵³ Mengeksploitasi kekayaan alam secara berlebihan (*israf*), serakah (*thama`*) dan tidak wajar adalah berbahaya (terlarang).

⁵¹ Muhammad Ghufroon, "Fikih Lingkungan," *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam* 10, no. 1 (2020): 159–76.

⁵² Luhur Prasetyo and Khusniati Rofiah, "The Formulation of Islamic Bank Performance Based on Contemporary Maqasid Al-Sharia," *Justicia Islamica* 18, no. 2 (2021): 318–34, <https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.3163>.

⁵³ Abid Rohmanu and Khusniati Rofiah, "Tāhā 'Abd Al-Raḥmān's Philosophical Contribution to Theorize Ethical Maqāsid," *Al-Ahkam* 33, no. 2 (2023): 185–206, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.2.17527>.

4. Keselarasan dan keseimbangan alam (ekosistem) mutlak ditegakkan. Mengganggu dan merusak ekosistem sama dengan menghancurkan kehidupan seluruhnya.
5. Semua makhluk adalah mulia (*muhtaram*). Siapapun dilarang mengeksploitasi atau menyiksa semua jenis makhluk yang menyebabkan kehidupan terganggu. Binatang buas atau liar sekalipun tidak dibenarkan dibunuh selama tidak menyerang dan mengancam jiwa seseorang.
6. Manusia adalah pelaku pengelolaan alam semesta (*mukallaf*) akan diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu jika lingkungan hidup tidak terpelihara dan rusak, maka tentu bahayanya akan menimpa pada semua komponen dasar kehidupan, yaitu keselamatan jiwa, keharmonisan keagamaan, perlindungan kekayaan, keturunan, dan kehormatan, dan kesehatan akal.⁵⁴

Selama ini penelitian yang terkait *fiqh al-bi'ah* masih terbatas pada beberapa aspek saja. Penelitian tentang konsep *blue economy* yang diakitkan dengan *fiqh al-bi'ah* masih jarang dilakukan, sehingga penelitian ini hadir untuk mengisi gap penelitian yang sudah ada dan memberikan kontribusi terhadap hal tersebut penyelesaian permasalahan lingkungan pesisir.

D. Teori Pertumbuhan Ekonomi Kelautan

Teori pertumbuhan ekonomi kelautan berfokus pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

⁵⁴ Implementasi Peraturan, “5539-19793-1-Pb” 3, no. 1 (2023): 18–34.

dan pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Ekonomi kelautan merujuk pada semua aktivitas ekonomi yang bergantung pada laut dan sumber daya yang dihasilkan yang mencakup sektor-sektor seperti perikanan, energi terbarukan, pariwisata bahari, dan industri maritim. Dengan memanfaatkan potensi laut secara berkelanjutan, ekonomi kelautan diharapkan dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional.⁵⁵ Indonesia memiliki potensi ekonomi kelautan yang sangat besar, diperkirakan mencapai USD 1.334 triliun atau setara dengan Rp 19.371 triliun. Potensi ini berasal dari berbagai sektor kelautan seperti perikanan, energi terbarukan, pariwisata dan industri maritim. Pertumbuhan ekonomi kelautan tidak terlepas dari konsep *blue economy* yang mana dalam kegiatannya implementasi *blue economy* sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi kelautan. Pertumbuhan ekonomi kelautan yang dimaksud meliputi :

1. Kondisi lingkungan sekitar

Dengan pendekatan ekonomi biru dapat mengoptimalkan sumber daya kelautan yang diimbangi menjaga ekosistem, meminimalkan limbah dan mendukung keberlanjutan.

2. Kesejahteraan masyarakat

Indeks kesejahteraan masyarakat kelautan menunjukkan bahwa program pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan.⁵⁶

⁵⁵ “Pertumbuhan Ekonomi Kelautan,” n.d., <https://pksp1.ipb.ac.id/kelautan-sebagai-sumber-pertumbuhan-ekonomi-baru-2/>. Di akses pada tanggal 05 November 2024

⁵⁶ Sjarief Widjaja, *Telaah Akademik : Perspektif Pembangunan Ekonomi Kelautan*, 2021, <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/amafrad/issue/view/825>.

3. Pengembangan pariwisata.

Pariwisata berkelanjutan yang memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, memberikan manfaat ekonomi jangka panjang dan melindungi keanekaragaman hayati.⁵⁷

Teori pertumbuhan ekonomi kelautan menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, sektor kelautan dapat menjadi motor penggerak utama bagi pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan.⁵⁸



⁵⁷ “Pertumbuhan Ekonomi Kelautan.” <https://pkspl.ipb.ac.id/kelautan-sebagai-sumber-pertumbuhan-ekonomi-baru-2/>. Di akses pada tanggal 05 November 2024

⁵⁸ Banu, “Konsep Blue Economy Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Indonesia.”

BAB III

IMPLEMENTASI *BLUE ECONOMY* DI DAERAH WISATA PANTAI MUTIARA TRENGGALEK

A. Sejarah Pantai Mutiara Trenggalek

Pantai Mutiara di Trenggalek ini mungkin bisa dibilang baru ditemukan oleh masyarakat Trenggalek, karena dulunya yang terkenal di Trenggalek adalah Pantai Prigi dan Pantai Pasir Putih kemudian warga masyarakat Watulimo Trenggalek melihat potensi di Pantai Mutiara untuk menjadi wisata. Dulu akses ke Pantai Mutiara sangat susah dikarenakan tempatnya ada di balik gunung dan hanya bisa diakses dengan jalan kaki. Akhirnya dengan penuh kesadaran masyarakat setempat sepakat untuk mengelola Pantai Mutiara dan dijadikan wisata agar bisa menambah pemasukan warga sekitar.⁵⁹

Pemerintah Trenggalek meresmikan Pantai Mutiara ini belum lama. Pantai Mutiara Trenggalek masih dalam proses pengembangan sebagai daerah wisata. Wisata pantai saat ini masih dikelola oleh kelompok masyarakat yang bekerjasama dengan PERHUTANI, pemandangan di sekitar pantainya berbukit, sehingga para wisatawan bisa melihat pemandangan dari atas atau turun ke pantai untuk bermain air laut. Pasir dipantai ini putih dan lembut dengan ombak yang kecil sehingga para wisatawan bisa dengan mudah bermain di pinggir pantai, dan kalau suka berenang di Pantai, bisa juga untuk berenang di sini. Pantai Mutiara Trenggalek memiliki pesona alam yang indah dengan pasir putih dan laut yang biru. Hal ini sempat dilirik mantan Menteri

⁵⁹ Sugeng, "Wawancara, 21 Juni 2024".

Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Beberapa waktu lalu, Susi menyempatkan untuk datang ke Pantai Mutiara saat kunjungan ke Trenggalek. Ia sangat menikmati keindahan pantainya. Namun saat itu Susi juga menyayangkan rusaknya sejumlah terumbu karang di Pantai Mutiara Trenggalek, serta adanya sampah plastik. Melalui Wakil Bupati Trenggalek beliau berpesan agar menjaga kondisi Pantai Mutiara agar tetap alami dan bersih dari sampah.

Letak geografis Pantai Mutiara ini mudah dijangkau dengan melewati perkampungan yang asri. Kalau dari pusat Kota Trenggalek, butuh waktu kurang lebih dua jam dengan jarak 44 kilometer. Dari pusat kota, masuklah ke Jalan Nasional III dan lanjutkan perjalanan menuju Jalan Dusun Tanggung. Kemudian, lanjutkan perjalanan ke Jalan Raya Bandung-Prigi di kawasan Bantengan. Mengikuti jalan sampai bertemu Gares Kidul. Setelah itu, masuk ke Jalan Pantai Prigi, ikuti saja jalannya, maka Pantai Mutiara akan ada di sisi kanan jalan. Pantai Mutiara tepatnya berada di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek.⁶⁰

Penelitian ini melibatkan orang-orang yang memiliki kontribusi penuh terhadap perkembangan Pantai Mutiara dalam mengimplementasikan *blue economy*. Responden dalam penelitian ini yaitu pengelola Pantai yang diantaranya adalah POKDARWIS dan POKMASWAS, selain itu UMKM sekitar, pengunjung, dan Dinas terkait.

⁶⁰ bps Trenggalek, "Letak Geografis Kabupaten Trenggalek."

B. Implementasi *Blue economy* di Daerah Wisata Pantai Mutiara Trenggalek

Perubahan zaman semakin melaju begitu cepat dan semakin modern. Hal ini menyebabkan banyak masalah, salah satunya hubungan manusia dengan alam. Banyak hal yang dilakukan manusia untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin tanpa memikirkan kondisi alam menjadikan banyak permasalahan yang akhirnya perlu adanya solusi untuk menyelesaikannya. Indonesia adalah negara maritim yang memiliki laut cukup luas dan sangat berpotensi mengembangkan ekonomi kelautannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu dengan adanya konsep *blue economy* ini cukup membantu menjaga ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat.

Pantai Mutiara Trenggalek berada di sebelah pantai prigi dan pasir putih yang terletak di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Pengelolaan Pantai Mutiara dikelola oleh dua lembaga yaitu Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Rembeng Raya. Untuk POKDARWIS mengelola Pantai Mutiara khusus bagian darat nya seperti pengelolaan sampah, yang mengatur SOP untuk pengujung, pengelolaan terkait perekonomian di daerah Pantai Mutiara. Selain itu POKDARWIS dalam mengelola Pantai Mutiara bekerja sama dengan PERHUTANI karena lahan yang digunakan untuk daerah wisata Pantai Mutiara adalah milik PERHUTANI, tetapi selama pengelolaan ini PERHUTANI hanya ikut mengawasi sedangkan untuk pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh POKDARWIS. Untuk pengelolaan laut khusus di kelola oleh POKMASWAS dibawah naungan Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek.⁶¹

⁶¹ Sugeng, "Wawancara 21 Mei 2024," n.d.

Menurut Ermanto selaku dinas perikanan dalam wawancara dengan peneliti menjelaskan bahwasannya *blue economy* adalah tentang kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau menurut saya blue economy itu perihal kelestarian dan kesejahteraan, jika hanya lestari saja tapi masyarakat tidak sejahtera ya sama saja dan sebaliknya jika masyarakatnya sejahtera tetapi lingkungannya tidak lestari itu tidak seimbang namanya”.⁶²

Adanya konsep *blue economy* menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan pelestarian lingkungan di daerah pesisir. Konsep *blue economy* di daerah wisata Pantai Mutiara perlahan mulai terimplentasi dengan maksimal namun juga masih banyak kendala yang dialami. Berikut pembahasan pada masing-masing prinsip dan indikator:

2. Efisiensi Alam

Efisiensi alam yang dimaksud adalah pada pengelolaan sumber daya yang tepat dan sesuai kebutuhan tanpa melakukan eksploitasi lingkungan dengan melihat dampak dari apa yang digunakan dalam kegiatan perekonomian di daerah pesisir. Berikut bentuk implementasi prinsip pemanfaatan sumber daya alam di Pantai Mutiara Trenggalek:

a. Pemanfaatan sumber daya alam

Masyarakat daerah wisata Pantai Mutiara Trenggalek memanfaatkan sumber daya alam dengan tepat. Salah satunya adalah penggunaan batok kelapa sebagai transpalantasi terumbu karang, hal ini di sampaikan oleh Gunawan, salah satu pengelola Pantai Mutiara.

“Dalam transplansi terumbu karang kami menggunakan bioreeftek itu mba, karena kalau menanam terumbu karang itu kan perlu waktu yg lama

⁶² Ermanto, “Wawancara 4 Juni 2024.

*kisaran beberapa tahun, makanya kita memanfaatkan batok kelapa sebagai solusi transparansi terumbu karang”.*⁶³

Dari pernyataan di atas bahwasannya adanya inovasi *bioreeftek* tidak hanya mengefisien sumber daya alam tapi juga efisiensi waktu dalam menjaga lingkungan. Selain itu adanya wahana yang ada di Pantai Mutiara seperti *banana boot*, *speed boot*, dan lain- lain juga sebagai bentuk efisien sumber daya alam, hal ini di sampaikan oleh Ermanto.

*“Dulu itu kaya masa kacuk dan kawan- kawannya adalah nelayan, mata pencahariaannya ya mencari ikan, karena ada ini ya lumayan semisal kaya mas kacuk terus menyewakan wahana itu kan dia yang mengikuti kebutuhan tanpa merusak terumbu karang.”*⁶⁴

Dari pernyataan di atas adanya konsep *blue economy* membuat masyarakat sekitar dapat memanfaatkan pantai tidak hanya sebagai kunjungan semata tetapi juga memanfaatkan pantai sebagai penunjang perekonomian warga.

Gambar. 1. Pemanfaatan Sumber Daya Alam



⁶³ Gunawan, “Wawancara 21 Mei 2024”.

⁶⁴ Ermanto, “Wawancara 4 Juni 2024.”



b. Tidak menggunakan emisi bahan yang berbahaya

Nelayan di daerah wisata Pantai Mutiara Trenggalek merupakan nelayan tradisional yang menggunakan pancing dan jaring untuk menangkap ikan. Hal ini juga disampaikan oleh Gunawan.

*“Kalau disini nelayan nya ya semua peralatan masi menggunakan cara tradisional seperti pakai rumpon. Nah rumpon itu kita dapet nya dulu pertama bantuan dari pemerintah”.*⁶⁵

Dari pernyataan di atas bahwasanya nelayan di sini sangat menjaga ekosistem laut dengan tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya.

Gambar 2.1 Tidak Menggunaka Emisi yang Bebahaya



⁶⁵ Gunawan, “Wawancara 21 Mei 2024.”

c. Tidak mengganggu dan tidak merusak ekosistem alam

Blue economy tidak hanya tentang kesejahteraan saja tapi juga tentang kelestarian. Sama halnya dengan mengefisiensi sumber daya alam dan tidak menggunakan bahan yang berbahaya juga berkaitan dengan kelestarian ekosistem. Sebagai manusia yang selalu berdampingan dengan alam sudah seharusnya sama-sama menjaga kelestarian ekosistem. Hal ini juga berlaku dengan konsep *blue economy* yang diterapkan di Pantai Mutiara Trenggalek. Masyarakat tidak hanya memanfaatkan alamnya saja namun juga melindungi ekosistem yang ada. Hal ini disampaikan oleh Sugeng.

“Ya kalau kita terus menggerus alam nanti bagaimana generasi selanjutnya? Maka dari itu kita sangat tegas dengan kesehatan ekosistem sekitar pantai, seperti tegas akan larangan membuang sampah ke sungai sungai”.⁶⁶

Hal yang sama dikatakan pak Gunawan bahwa salah satu cara menjaga ekosistem laut yaitu dengan cara tidak menggunakan bom ke laut untuk mendapatkan ikan.

“Dulu itu ada mba yang pakai bom untuk dapat ikan tetapi ya kami larang dan menjadi larangan keras disini, bener dapat ikan banyak tetapi untuk apa dapat ikan banyak jika setelah itu ekosistem laut rusak, kan bom seperti itu merusak ekosistem laut seperti mematikan plankton-plankton dan akhirnya tidak bisa jadi ikan”.⁶⁷

3. Zero Waste

Zero waste adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi limbah sampah lingkungan, Semakin lama tidak hanya manusia yang semakin banyak

⁶⁶ Sugeng, “Wawancara 21 Mei 2024,”

⁶⁷ Gunawan, “Wawancara 21 Mei 2024.”

begitu pula sampah yang dihasilkan. Maka dari itu perlu adanya solusi untuk mengatasi limbah- limbah atau sampah yang dibuang begitu saja dan akhirnya akan mengganggu bahkan mencemari lingkungan sekitar. Berikut implementasi prinsip *blue economy* di Daerah wisata Pantai Mutiara Trenggalek:

- a. Meminimalisir dan mengurangi adanya limbah yang diperoleh dari kegiatan ekonomi

Dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan di daerah Pantai Mutiara Trenggalek para pengelola sangat peduli dengan lingkungan dengan memberikan tempat sampah di beberapa titik di sekitar pantai. Hal ini di ungkapkan oleh pak Sugeng.

“Untuk meminimalisir sampah yang ada, ya, kita sangat menjaga kebersihan, dengan memberikan tempat sampah di beberapa titik dan membedakan sampah organik dan non organik, walaupun hal tersebut tidak terlalu maksimal, setidaknya bisa meminimalisir, karena kita juga tidak bisa mengawasi pengunjung satu persatu terkait pembuangan sampah, tapi kami juga sering menyiarkan dengan pengeras suara terkait membuang sampah pada tempatnya.”⁶⁸

Dari pernyataan tersebut dijelaskan bahwasanya pengelola sangat memperhatikan pembuangan sampah pada tempatnya, dan mereka sangat antusias untuk selalu menjaga lingkungan pantai dari sampah.

⁶⁸ Sugeng, “Wawancara 21 Mei 2024.”

Gambar. 3.2 Implementasi *Zero waste*



b. Pengelolaan limbah menjadi produk baru yang lebih ekonomis

Untuk mengatasi adanya sampah yang menumpuk dan limbah hasil kegiatan ekonomi memang perlu adanya inovasi seperti pembuatan produk baru yang lebih ekonomis dari sampah. Namun sampai sekarang pengelola pantai belum melakukan inovasi tersebut alhasil dalam pengelolaan sampah pengelola hanya membuang sampah-sampah tersebut berakhir di tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS). Hal ini diungkapkan oleh Gunawan.

“kalau untuk pengelolaan sampah gitu belum ada mba, ya paling kita mengumpulkan sampah dan dibuang sama truck sampah itu ke TPS”.⁶⁹

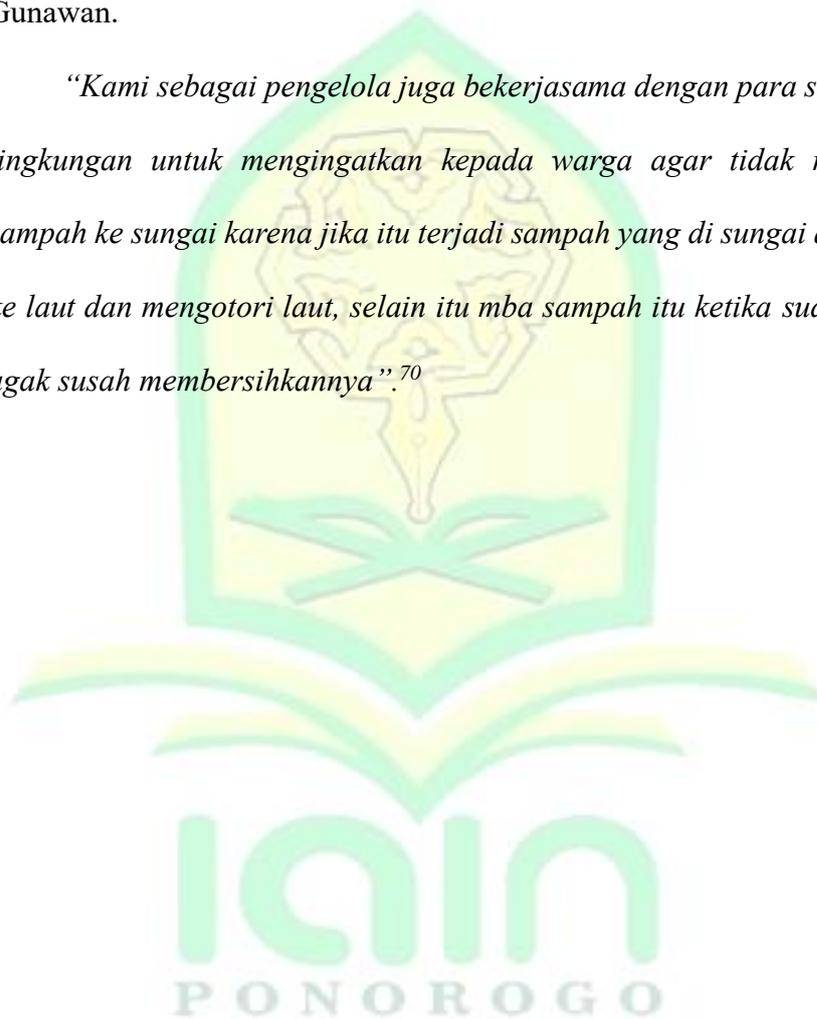
c. Berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan Pantai.

Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama bukan hanya tugas pengelola dan dinas terkait namun juga tugas masyarakat sekitar. Jika

⁶⁹ Gunawan, “Wawancara 21 Mei 2024.”

kebersihan hanya menjadi tanggung jawab pengelola tidak akan maksimal, karena yang berada di lingkungan pantai tersebut tidak hanya pengelola namun *masyarakat* sekitar juga. Hal ini menjadi pengingat bahwa tanpa adanya sinergitas seluruh elemen masyarakat kebersihan lingkungan pantai tidak akan maksimal. Hal tersebut diungkapkan oleh pak Sugeng dan pak Gunawan.

*“Kami sebagai pengelola juga bekerjasama dengan para stakeholder lingkungan untuk mengingatkan kepada warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena jika itu terjadi sampah yang di sungai akan turun ke laut dan mengotori laut, selain itu mba sampah itu ketika sudah ke laut agak susah membersihkannya”.*⁷⁰



⁷⁰ Gunawan

Gambar. 3. Berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan Pantai.



4. Inklusivitas Sosial dan Lapangan Kerja

Inklusivitas sosial dan peluang lapangan kerja adalah upaya untuk menciptakan masyarakat yang setara adil dan merata serta dapat membuka lapangan kerja. Prinsip ini mengarah pada hubungan sosial diantara masyarakat maupun pemerintah. Di mana aspirasi disalurkan melalui program kemitraan atau kelompok kemasyarakatan, dan masyarakat pesisir diakui memiliki hak untuk menjaga keberlangsungan hidup bermasyarakat dan mengelola sumber daya alam. Dalam hal ini daerah Pantai Mutiara sudah mengimplementasi prinsip tersebut. Berikut implementasi *blue economy* prinsip inklusivitas dan lapangan kerja:

a. Terwujudnya kemitraan dengan masyarakat

Adanya kemitraan dengan masyarakat bisa mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh elemen masyarakat dengan adanya pemberdayaan pesisir tidak hanya menguntungkan pengelola namun juga menguntungkan masyarakat sekitar.

*“Kalau kemitraan di sini itu, bahan baku yang dijual oleh pedagang di sini itu dari luar, seperti pemasok kelapa terus minuman juga dari luar jadi kita mitra dengan beberapa pedagang yang menjadi pemasok bahan ke warung. Selain itu, kalau di Pantai Mutiara ini pekerjanya semua adalah warga Tasikmadu”.*⁷¹

Hal ini disampaikan oleh Sugeng yang dapat disimpulkan bahwasanya untuk mencapai inklusivitas sosial perlu adanya kemitraan dengan masyarakat dan memberdayakan masyarakat sekitar untuk ikut serta dalam pengelolaan Pantai Mutiara.

b. Pemberdayaan komunitas lokal

Hal ini juga menjadi salah satu penunjang peningkatan SDM yang berada di daerah pesisir, seperti yang disampaikan oleh Sugeng, *“Biasanya juga ada mba pelatihan pelatihan gitu dari pemerintah nah kita tinggal delegasikan orang orang.”*⁷² Hal tersebut juga disampaikan oleh Ermanto, *“Kaya kemaren itu juga ada mba sertifikasi diving dari pemerintah provinsi itu mas kacuk ikut, kalau sertifikasi kaya gitu kan cari sendiri juga mahal*

⁷¹ Sugeng, “Wawancara 21 Mei 2024.”

⁷² Sugeng, “Wawancara, 21 Juni 2024”

mba, berhubung ini gratis makanya kita juga mendelegasikan dari perwakilan masyarakat.”⁷³

Dari pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa bentuk pemberdayaan komunitas juga harus difasilitasi dari pemerintah karena dengan adanya pemberdayaan seperti ini sebagai bentuk investasi jangka panjang bagi komunitas komunitas lokal tersebut untuk mengelola lingkungan pesisir.

c. Penciptaan lapangan kerja

Terciptanya industri yang kreatif dan inovasi yang maksimal mempengaruhi prospek lapangan kerja yang ada di daerah Pantai Mutiara. Hal ini disampaikan oleh pak Sugeng.

“Dengan adanya pantai ini sangat membantu perekonomian masyarakat mba, soalnya ya benar- benar membuka lapnan kerja untuk masyarakat sekitar, contoh nya ibu- ibu yang punya warung tiu dulu pengangguran mba karena sekarang sudah menjadi tempat wisata akhirnya bisa membuka usaha dan merekrut pekerja.”⁷⁴

Dari pernyataan tersebut dengan adanya daerah wisata Pantai Mutiara ini membuka banyak lapangan pekerja untuk masyarakat sekitar. Selain itu hal ini juga disampaikan oleh Ermanto, *“Kalau di Pantai Mutiara itu kan blue economy-nya itu juga fokus untuk mensejahterakan masyarakat*

⁷³ Ermanto, “Wawancara 4 Juni 2024.”

⁷⁴ Sugeng, “Wawancara 21 Mei 2024.”

dengan adanya beberapa usaha di situ, dulu itu warga sekitar hanya menjadi nelayan namun sekarang mempunyai usaha sampingan seperti pemilik warung, penyewa wahana dan penyewa karpet dan lain-lain.”⁷⁵

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwasannya dengan adanya daerah wisata Pantai Mutiara Trenggalek ini para nelayan tidak hanya memiliki satu pekerjaan namun juga memiliki sampingan seperti sebagai pemilik warung, penyewa jasa wahana dan lain-lain, hal ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

4. Keseimbangan antara Produksi dan Konsumsi

Keseimbangan antara produksi dan konsumsi merupakan prinsip yang membahas mengenai bagaimana keseimbangan antara ekologi, sosial dan ekonomi bisa saling berjalan secara bersamaan. Hal ini juga menjadi efek ekonomi pengganda yang mana setiap ekstraksi bahan baku alam seharusnya memberikan efek ganda artinya aktifitas ekonomi yang dilakukan dapat membangun ekonomi yang berkelanjutan dan berdampak luas. Berikut implementasi *blue economy* melalui prinsip keseimbangan antara produksi dan konsumsi:

a. Pengelolaan pantai dengan memperhatikan keberlanjutan ekosistem

Dalam mengelola pantai pastinya para pengelola tidak hanya memikirkan hal yang menguntungkan untuk manusia. Namun di Pantai Mutiara seluruh pengelola dengan kesadaran penuh sangat peduli dengan lingkungan sekitar, hal ini disampaikan oleh Sugeng, “*Kitakan sudah tua ga*

⁷⁵ Ermanto, “Wawancara 4 Juni 2024.”

selamanya kita terus, kita juga butuh regenerasi. Maka dari itu kita gak bisa terus menggerus alam tanpa memikirkan keberlanjutannya, makanya menjaga kebersihan dan segala inovasi yang sudah dilakukan di sini itu upaya bentuk menjaga ekosistem agar bisa terus berlanjut.”⁷⁶

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwasannya pengeksploitasian alam yang berlebihan tidak diperbolehkan dan harus memikirkan keberlanjutan ekosistem agar generasi mendatang masih tetap bisa merasakan manfaat dari sumber daya alam sekitar.

- b. Edukasi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keseimbangan alam di sekitar pantai

Dengan adanya pengembangan sumber daya manusia melalui edukasi dan partisipasi masyarakat ini bisa menjaga keseimbangan alam. Dengan adanya edukasi dan partisipasi serta kesadaran penuh masyarakat terhadap keseimbangan alam ini adalah bentuk investasi jangka panjang untuk menjaga agar ekosistem dapat berkelanjutan.

*“Kami juga sering melakukan sosialisasi ke SD, atau bahkan dari SD melakukan belajar di luar sekolah lalu ke pantai untuk studi banding dan dari pihak pengelola menjelaskan. pengetahuan tentang blue economy”.*⁷⁷

Hal ini di sampaikan oleh Sugeng, dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwasannya edukasi mengenai menjaga lingkungan tidak hanya berlaku untuk masyarakat yang sudah dewasa namun edukasi dimulai sejak dini.

⁷⁶ Sugeng, “Wawancara 21 Mei 2024.”

⁷⁷ Sugeng, “Wawancara, 21 Juni 2024”

- c. Memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang berjalan tidak merusak lingkungan.

Dengan berjalannya ekonomi di daerah wisata Pantai Mutiara pengelola dan masyarakat harus memastikan bahwa seluruh kegiatan ekonomi yang ada tidak akan merusak lingkungan. Dalam kegiatan ekonomi yang berjalan di daerah wisata Pantai Mutiara Trenggalek sejauh ini tidak ada kegiatan ekonomi yang berpotensi sangat merusak lingkungan. Hal tersebut disampaikan oleh Sugeng.

“Kalau di sini itu warung warung itu ditegaskan terkait pembuangan sampah atau limbah makanan dari hasil jualannya itu dikumpulkan jangan sampai dibuang sembarangan nanti dari teman-teman pengelola yang membuang ke TPS, selain itu pengelola juga tidak pernah bosan untuk mengingatkan kepada pengunjung agar tidak membuang sampah ke laut dan membuang sampah pada tempatnya.”⁷⁸

5. Inovasi dan Adaptasi Terbuka

Inovasi terbuka yang dimaksud adalah melibatkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat lokal. Tujuannya adalah untuk menciptakan solusi inovatif yang dapat meningkatkan keberlanjutan dan produktivitas sektor kelautan. Seperti pembangunan teknologi baru untuk energi terbarukan laut, seperti energi angin lepas pantai dan energi gelombang, serta inovasi dalam akuakultur yang lebih ramah lingkungan.⁷⁹ Dalam hal ini Pantai Mutiara belum menemukan inovasi khususnya yang berkaitan dengan energi terbarukan hal ini disampaikan oleh Gunawan selaku pengelola pantai.

⁷⁸ Sugeng, “Wawancara, 21 Juni 2024”

⁷⁹ EU *Blue economy*, “No Title,” n.d., https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news-and-updates/eu-blue-economy-innovation-and-new-opportunities-make-way-green-transition-2024-05-30_en. Diakses tanggal 01 oktober 2024

“Kalau inovasi terkait energi terbarukan seperti itu belum ada. Salah satu alasannya karena dana dari pemerintah juga terbatas.”⁸⁰

Adaptasi terbuka yang dimaksud adalah kemampuan untuk menyesuaikan strategi dan praktik berdasarkan perubahan kondisi lingkungan dan sosial. Dalam *blue economy* ini bisa berarti penyesuaian metode penangkapan ikan untuk mengurangi *overfishing* atau mengembangkan infrastruktur yang lebih tahan terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Adaptasi terbuka juga melibatkan penggunaan data dan teknologi untuk memantau kesehatan ekosistem laut dan pesisir serta mengimplementasikan kebijakan yang responsif terhadap temuan tersebut.

Hal ini disampaikan oleh pak Ermanto selaku anggota bidang tangkap dinas perikanan Kabupaten Trenggalek.

“Pertama kali saya ke sini ada bantuan dari menteri namanya rumpon. Rumpon itu suatu alat bantu yang sifatnya menarik plankton, lalu ikan kecil mengumpul makan plankton dan membentuk rantai makanan namun tidak langsung dapat respon yang baik dari masyarakat jadi dulu juga sempat didemo oleh masyarakat karena menurut mereka tidak efektif, soalnya kan yang tau letak rumpon itu ya yang pasang rumpon, selain itu katanya ikannya ke pinggir semua ke arah rumpon dan yang lain tidak kebagian, tetapi setelah tau hasilnya para nelayan sangat mendukung metode tangkap menggunakan rumpon karena sangat membantu dalam penangkapan dan tidak merusak lingkungan.”⁸¹

Dari pernyataan tersebut penggunaan rumpon merupakan salah satu metode tangkap yang membuat ekosistem laut tetap terjaga dan menghindari *overfishing*, apabila *overfishing* ini terjadi maka populasi ikan akan menurun selain itu kerusakan habitat laut, gangguan rantai makanan dan dampak sosial

⁸⁰ Gunawan, “Wawancara 21 Mei 2024.”

⁸¹ Ermanto, “Wawancara 4 Juni 2024.”

dan ekonomi yang mana dari akibat *overfishing* ini dapat menurunkan pendapatan masyarakat sekitar.

C. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Implementasi *Blue economy* di Daerah Wisata Pantai Mutiara Trenggalek

Blue economy merupakan konsep yang memikirkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan dapat berjalan langsung. Dalam Islam pun juga turut mengatur tentang implementasi *blue economy* di dalam Al-Qur'an, seperti efisiensi alam, pengurangan limbah, inklusivitas sosial dan lapangan kerja, keseimbangan antara produksi dan konsumsi dan inovasi dan adaptasi terbuka. Selama pengimplementasian konsep *blue economy* ada beberapa faktor yang menjadi acuan.

Dalam pengimplementasi *blue economy* dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi *blue economy* adalah faktor lingkungan, faktor sosial, faktor ekonomi, dan kebijakan terintegritas. Berikut faktor- faktor yang mempengaruhi implementasi *blue economy* di daerah wisata Pantai Mutiara Trenggalek.⁸²

Faktor lingkungan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi *blue economy* di Daerah wisata Pantai Mutiara Trenggalek. Seperti yang disampaikan oleh pengelola pantai bahwasannya dalam pelestarian lingkungan menjadi faktor utama dalam mendukung implementasi *blue economy*. Hal ini disampaikan oleh Sugeng dan Gunawan.

⁸² Amelia Vega Buana, Nouva Ayu, and Maria Yovita R.Pandin, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip Blue Economy Dan Dampak Pada Masyarakat Di Wilayah Pesisir Kenjeran Surabaya," *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Perencanaan Kebijakan* 1, no. 4 (2024): 1–12, <https://doi.org/10.47134/jampk.v1i4.334>.

“Jika lingkungan lestari mudah untuk kita mengimplementasi blue economy, dengan menerapkan blue economy juga lingkungan bisa lebih lestari dan dapat berkelanjutan.”⁸³ “Maka dari itu kami sangat tegas kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih demi keberlanjutan ekosistem laut dan sekitar pantai”.⁸⁴

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwasannya dengan melestarikan lingkungan akan memudahkan pengelola dalam mengimplementasikan *blue economy*, karena tujuan dari *blue economy* salah satunya adalah kelestarian lingkungan. Oleh karena itu faktor ini sangat berpengaruh untuk keberhasilan implementasi *blue economy*.

Selanjutnya faktor sosial, faktor sosial memuat pemberdayaan masyarakat, jika masyarakat berdaya ini akan menjadi investasi jangka panjang untuk masing- masing personal dan banyak orang.⁸⁵ Jika masyarakat terus diberdayakan akan menjadi investasi bagi lingkungan sekitar dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Sugeng.

“Salah satu bentuk kita memberdayakan masyarakat itu biasanya mendelegasikan mereka ke berbagai pelatihan, belum lama ini juga ada pelatihan perhotelan. Pelatihan ini sangat bermanfaat untuk di implementasikan di sini.”⁸⁶

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwasannya dengan memberdayakan masyarakat untuk turut serta dalam berbagai pelatihan bisa menjadi investasi jangka panjang dalam mengimplementasikan *blue economy*. Ia juga menyatakan, *“Untuk pengelola semua itu dari warga sini, jadi kita memberdayakan masyarakat sekitar untuk turut mengelola Pantai Mutiara agar*

⁸³ Sugeng, “Wawancara 21 Mei 2024.”

⁸⁴ Gunawan, “Wawancara 21 Mei 2024.”

⁸⁵ Adzin, Urwatil, Muhammad suyuti and Hurriyati, “Implementasi Blue Economy Di Wilayah Pesisir Ampenan Kecamatan Ampenan Kota Mataram.”

⁸⁶ Sugeng, “Wawancara 21 Mei 2024.”

masyarakat ikut merasakan bagaimana mengelola pantai dan memiliki rasa tanggung jawab besar dalam menjaga lingkungan”⁸⁷

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwasannya dengan memberdayakan masyarakat sekitar untuk mengelola pantai ini akan mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi *blue economy* di Pantai Mutiara.

Selanjutnya faktor ekonomi, faktor ekonomi menjadi salah satu aspek yang sangat mempengaruhi implementasi *blue economy* di daerah wisata Pantai Mutiara Trenggalek. Faktor ekonomi sendiri meliputi ketersediaan teknologi, dukungan pendanaan dan infrastruktur yang memadai. Dalam implementasi *blue economy* perlu adanya teknologi canggih dan teknologi terbarukan untuk menunjang keberhasilan dalam mengimplementasi *blue economy*. Hal ini disampaikan oleh Gunawan, “*Untuk penggunaan teknologi terbarukan kita memakai itu, karena dana dari pemerintah yang terbatas selain itu jika harus menggunakan dana pribadi dari pengelola itu membutuhkan biaya yang sangat banyak.*”⁸⁸

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya dalam implementasi *blue economy* di Pantai Mutiara belum menggunakan teknologi terbarukan karena kurangnya pendanaan dari pemerintah. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ermanato. “*Kekurangan kita itu di teknologi canggih karena terbatasnya dana pemerintah padahal apabila bisa menggunakan teknologi yang lebih canggih pastinya dalam penggunaan sumber daya alam bisa lebih*

⁸⁷ Sugeng, “Wawancara 21 Mei 2024.”

⁸⁸ Gunawan, “Wawancara 21 Mei 2024.”

efisien selain itu juga akan menambah perekonomian masyarakat dan pastinya lingkungan bisa lebih lestari.”⁸⁹

Infrastruktur menjadi bagian dari faktor ekonomi yang mempengaruhi implementasi *blue economy*. Jika infrastruktur baik dan memadai pasti akan membantu prosesnya implementasi *blue economy*. Hal ini disampaikan oleh Sugeng. *“Dulu itu jalan menuju Pantai Mutiara ini jalan setapak bukan kaya jalan biasa, akhirnya dengan ketekadan seluruh masyarakat sekitar. Kami iuran untuk pembangunan jalan, seiring berjalannya waktu kas lingkungan menambah alhamdulillah sekarang jalan menuju Pantai Mutiara sudah bagus dan dapat diakses dengan mudah.”⁹⁰*

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwasannya sebelum Pantai Mutiara memiliki jalan yang layak jarang dikunjungi oleh orang banyak karena akses jalan yang susah, namun setelah diperbaiki pengunjung yang datang terus bertambah. Selain itu hal yang sama juga disampaikan oleh Isdarsono, *“Dulu biasa nya pengunjung itu yang datang dalam 5 bulan hanya 1000-2000 pengunjung namun sekarang bisa mencapai 5000-6000 pengunjung. Hal ini karena faktor ada JLS baru itu jadi orang-orang juga mudah mengakses Pantai Mutiara.”⁹¹*

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwasannya dengan adanya Jalan Lintas Selatan (JLS) Tulungagung baru yang dibuat pemerintah juga

⁸⁹ Ermanto, “Wawancara 4 Juni 2024.”

⁹⁰ Sugeng, “Wawancara 21 Mei 2024.”

⁹¹ Isdarsono, Wawancara 21 Mei 2024 (n.d.).

menjadi faktor dalam jumlah pengunjung yang datang dan ini sangat mempengaruhi bagaimana implementasi *blue economy* di Pantai Mutiara.

Selanjutnya kebijakan terintegrasi di mana faktor ini akan mengatur seluruh aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemerintah juga sudah bersinergi dalam pembentukan kebijakan dari tataran pusat sampai daerah hal ini dibuktikan dengan adanya UU RI NO 32 Tahun 2014 di tingkat pemerintahan pusat dan kebijakan menengani *blue economy* dari Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek.

Dalam realitanya seluruh aspek untuk pengelolaan pantai pengelola sudah membuat aturan seperti aturan untuk tidak membuang sampah ke laut, menjaga kebersihan pantai, peraturan kepada pemilik usaha di sekitar pantai untuk menyamakan harga barang dengan pasaran, dan semua orang boleh berkunjung untuk melakukan kegiatan ekonomi asalkan sudah mendapat izin dari pengelola. Hal ini disampaikan oleh Sugeng, "*Seluruh harga barang di sini itu sama semua, jadi tidak ada yang boleh melebihi warga karena jika pengunjung ada yang protes itu protesnya harus ke pengelola karena sudah ada aturan terkait harga barang yang dijual antara warung satu dan yang lainnya sama, selain itu kami juga memiliki aturan mengenai menjaga lingkungan seperti tidak membuang sampah ke laut, membuang sampah pada tempatnya seperti itu.*"⁹²

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwasannya semua hal diatur oleh pengelola hal ini sebagai bukti adanya kebijakan-kebijakan yang

⁹² Sugeng, "Wawancara 21 Mei 2024."

terintegrasi dapat mendukung implementasi *blue economy* di daerah Pantai Mutiara.

D. Dampak *Blue economy* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kelautan

Blue economy adalah konsep yang mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya laut secara bijaksana. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan pelestarian ekosistem laut, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi kelautan. Pertumbuhan Ekonomi kelautan yang dimaksud memuat tentang lingkungan sekitar, kesejahteraan masyarakat dan pengembangan pariwisata. Salah satu dampak utama dari penerapan *blue economy* adalah peningkatan perekonomian bagi kesejahteraan masyarakat pesisir, terjaganya lingkungan pesisir dan berkembangnya wisata daerah tersebut.

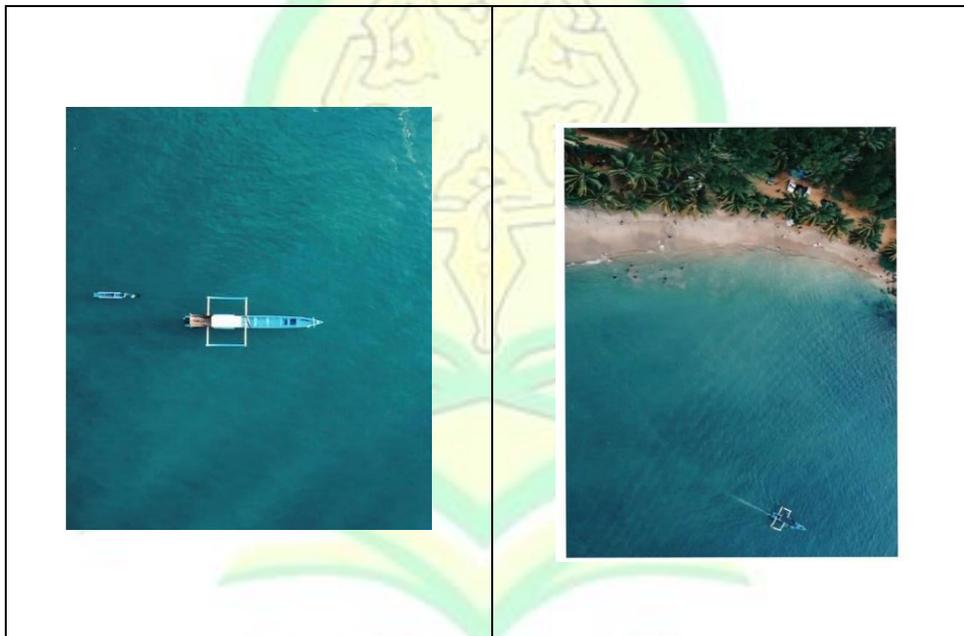
a. Dampak *blue economy* terhadap lingkungan sekitar

Blue economy mendorong inovasi dalam teknologi ramah lingkungan, seperti energi laut dan akuakultur berkelanjutan, yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan³. Inovasi ini juga berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dan mitigasi perubahan iklim, yang merupakan tantangan global yang signifikan. Secara keseluruhan, *blue economy* menawarkan pendekatan holistik yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan, menciptakan peluang baru bagi pengelolaan sumber daya laut yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Hal ini disampaikan oleh Gunawan.

“Dalam pengimplementasian inovasi yang ramah lingkungan seperti pengimplementasian bioreeftefektif itu ya mbak kalau buat ekosistem laut membuat ikan ikan itu punya rumah jadi rantai makanan tidak terputus, selain itu dapat membuat lingkungan pantai lebih terjaga apalagi ada terumbu karang buatan itu, karena hal-hal seperti itu tidak bisa langsung dirasakan tapi jangka panjang”⁹³

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwasannya dengan adanya pengimplementasian *blue economy* membuat sangat ramah lingkungan, selain itu juga membuat ekosistem laut lebih baik dan terjaga.

Gambar. 4. Kelestarian Lingkungan Sekitar



b. Dampak *Blue economy* terhadap kesejahteraan masyarakat

Blue economy merupakan konsep yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan ekosistem laut, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap tantangan lingkungan yang dihadapi sektor kelautan dan perikanan, seperti

⁹³ Gunawan, “Wawancara 21 Mei 2024.”

penangkapan ikan yang berlebihan, polusi, dan perubahan iklim. Dampak positif dari *blue economy* terhadap kesejahteraan masyarakat seperti dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor perikanan, pariwisata kelautan, dan bioteknologi laut, sehingga mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Sugeng.

“Setelah Pantai Mutiara ini kita rawat dengan baik menggunakan konsep blue economy sesuai arahan dari pemerintah jelas dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Jadi masyarakat bisa buka warung, buka penyewaan tikar dan lain-lain, selain itu yang sejahtera tidak hanya masyarakat saja namun pengelola juga sejahtera. Untuk pengelola sendiri membutuhkan 20 orang, selain itu untuk usaha warung juga rata-rata memiliki tiga karyawan. Untuk pendapatan pengelola ini mendapatkan pemasukan dari tiket. Hal ini juga di buktikan dengan kas lingkungan yang bertambah yang dulu sama sekali tidak punya kini uang kas per tahunnya bisa mencapai 25 juta bersih sudah dipotong untuk keperluan gaji pengelola dan kebutuhan lainnya.”⁹⁴

Selain itu, Warno selaku pemilik warung di sekitar Pantai juga mengatakan, *“Dulu itu pendapatan kita hanya mencapai 3-5 juta dalam sebulan, tetapi karena sekarang Pantai Mutiara semakin maju kita punya peluang pekerjaan yang lain dan pengunjung semakin ramai ini membuat pendapatan kita bisa mencapai 6-8 juta per bulan”*.⁹⁵

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwasanya dengan adanya konsep *blue economy* yang diterapkan di Pantai Mutiara berdampak baik terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.

c. Dampak *blue economy* terhadap pengembangan wisata

Blue economy yang menekankan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, memiliki peran penting dalam pengembangan sektor

⁹⁴ Sugeng, "Wawancara 06 November 2024".

⁹⁵ Warno, "Wawancara 21 Mei 2024".

pariwisata. Dengan memanfaatkan keindahan dan kekayaan laut, konsep ini tidak hanya berkontribusi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal. Pengembangan wisata berbasis *blue economy* mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan, seperti konservasi ekosistem, pengurangan limbah, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Hal ini mendorong munculnya destinasi wisata yang tidak hanya menarik bagi pengunjung, tetapi juga berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. Wisata bahari yang berkelanjutan, seperti snorkeling, penyelaman, dan ekowisata, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir sekaligus melestarikan keanekaragaman hayati laut. Hal ini juga disampiak oleh Gunawan.

“Dengan adanya konservasi laut dan inovasi bioreeftek itu membuat peluang baru seperti ada snorkling untuk melihata terumbu karang dana ikan-ikan kecil yang berkumpul jadi satu di dekat terumbu karang, selain itu juga ada penyewaan speed boot, banana boot untuk merasakan indahnya pantai.”⁹⁶

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan dengan melibatkan komunitas lokal dalam pengelolaan dan penyediaan layanan wisata, *blue economy* juga membantu memberdayakan masyarakat, memperkuat budaya lokal, dan menciptakan rasa kepemilikan terhadap sumber daya alam. Selain itu hal ini dibuktikan dengan jumlah pengunjung yang terus bertambah seperti yang diungkapkan Isdarsono, *“Jumlah pengunjung ini juga terus bertambah dulu itu biasanya cuma 1000-2000 pengunjung selama*

⁹⁶ Gunawan, “Wawancara 21 Mei 2024.”

seminggu namun sekarang dalam seminggu pengunjung bisa sampai 5000-6000 orang."⁹⁷

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwasannya implementasi *blue economy* berpengaruh terhadap perkembangan wisata dengan bukti pengunjung yang berdatangan semakin banyak. Dengan pendekatan yang tepat, *blue economy* berpotensi untuk menciptakan industri pariwisata yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan laut untuk generasi mendatang.



⁹⁷ Isdarsono, Wawancara 21 Mei 2024.

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI *BLUE ECONOMY* DI DAERAH WISATA PANTAI MUTIARA KABUPATEN TRENGGALEK

Implementasi konsep *blue economy* meneliti bagaimana pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Setelah menguraikan berbagai aspek dan contoh penerapannya, terlihat jelas bahwa keberlanjutan ekonomi ini bisa tercapai jika semua pihak berkolaborasi dan berkomitmen penuh. Analisis ini memperlihatkan betapa pentingnya peran setiap pemangku kepentingan dalam menerapkan dan memantau inisiatif tersebut agar dapat mencapai hasil yang optimal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan *blue economy* tidak hanya menguntungkan dari sisi ekonomi namun juga penting bagi kelestarian ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat.

A. Analisis Implementasi *Blue economy* di Daerah Wisata Pantai Mutiara Trenggalek

Pengelolaan pantai di daerah wisata Pantai Mutiara Trenggalek menjadi salah satu bentuk langkah penting dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mendukung sektor pariwisata yang berkelanjutan. Seiring berjalannya waktu peningkatan jumlah wisatawan tidak hanya membawa potensi besar terhadap perekonomian masyarakat namun juga menjadi tantangan bagi lingkungan alam sekitar. Pengelolaan pantai yang tepat dan implementasi kebijakan ramah lingkungan serta partisipasi aktif masyarakat dapat meminimalisir dampak

negatif terhadap ekosistem pantai. Dengan demikian, strategi pengelolaan yang baik tidak hanya menjaga keindahan alam namun juga memastikan keberlanjutan ekosistem lingkungan kedepannya.

Implementasi *blue economy* dapat menjadi jawaban untuk menjaga kelestarian dan kesejahteraan lingkungan pesisir. Karena lingkungan pesisir memiliki potensi yang luar biasa dari ranah ekonomi maupun pariwisata hal ini menjadi peluang bagi masyarakat sekitar jika dapat dikelola dengan tepat. Namun ada beberapa kendala dalam implementasi *blue economy*. Pertama, dukungan dinas terkait bagi pengelola pantai masih terbatas seperti kurangnya dana bantuan untuk proses pengelolaan pantai dengan alat-alat yang canggih. Kedua, kurang kesadarannya seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini menyebabkan implementasi *blue economy* di daerah wisata Pantai Mutiara Trenggalek belum maksimal. Dengan demikian implementasi *blue economy* harus dilakukan dengan tepat agar kelestarian lingkungan dan kesejahteraan bagi masyarakat bisa terwujud.

Menurut *Food Agriculture Organization of United Nations* menguraikan *blue economy* sebagai konsep yang menekankan pada perlindungan dan manajemen yang berkelanjutan, ekosistem laut yang sehat mampu menjadikan laut lebih produktif, dan ini merupakan mutlak harus ada bagi ekonomi yang berbasis kelautan.⁹⁸ *Blue economy* memiliki lima prinsip, yang pertama adalah efisiensi alam; kedua, *zero waste*; ketiga; inklusivitas sosial dan peluang

⁹⁸ Nursita and Tarbiyah, "Menggagas Pembangunan Blue Economy Terumbu Karang ; Sebuah Pendekatan Sosial Ekonomi EcceS : Economics Social and Development Studies Abstrak : Menggagas Pembangunan Blue Economy Terumbu Abstract : Initiating Development Blue Economy of Coral Reef ;"

lapangan kerja; keempat, keseimbangan antara produksi dan konsumsi, dan kelima, inovasi dan adaptasi terbuka. Dalam implementasi *blue economy* lima prinsip ini yang menjadi acuan pengelola dan mengelola lingkungan pesisir agar apa yang menjadi tujuan *blue economy* dapat terwujud dengan baik.

Dapat disimpulkan bahwasannya tujuan dari *blue economy secara* garis besar adalah kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Kedua hal tersebut harus berjalan bersamaan dan seimbang. Oleh karena itu terkait implementasi *blue economy* pada Daerah Wisata Pantai Mutiara Trenggalek bisa diuraikan sebagai berikut:

1. Efisiensi Alam

Efisiensi alam adalah pengelolaan sumber daya alam dengan lebih efisien dan sesuai kebutuhan tanpa melakukan eksploitasi lingkungan dengan melihat dampak dari apa yang sudah dilakukan. Berikut bentuk implementasi prinsip efisiensi alam di Pantai Mutiara Trenggalek:

a. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Memanfaatkan sumber daya alam dengan tepat merupakan salah satu prinsip yang harus dilakukan karena dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada dapat menghemat biaya dan menghemat waktu. Pantai Mutiara sudah mengimplementasikan pemanfaatan sumber daya alam dengan menggunakan batok kelapa sebagai alat untuk transplantasi terumbu karang dan menggunakan laut sebagai budidaya ikan kerapu serta menjadikan laut untuk tempat wahana *water sport*.

Terumbu karang memiliki fungsi ekologis sebagai penyedia nutrisi bagi biota laut, pelindung fisik, dan *nursery ground* dari berbagai biota. Namun kegiatan manusia yang selalu beraktivitas di laut mengancam rusaknya terumbu karang. Oleh karena itu para pengelola laut Pantai Mutiara menggunakan metode *bioreeftek* untuk menjaga kelestarian terumbu karang dan biota laut jika hanya mengandalkan terumbu karang yang asli akan memakan waktu yang lama maka perlu adanya metode yang lebih efisien seperti transplantasi terumbu karang menggunakan batok kelapa dan pengelola Pantai Mutiara sendiri juga sudah memanfaatkan laut sebagai wahana *water sport* dan budidaya ikan kerapu.

Implementasi *blue economy* yang dilakukan di Pantai Mutiara sesuai dengan tujuan *blue economy* prinsip efisiensi alam indikator pemanfaatan sumber daya alam selain itu juga sesuai dengan konsep Islam seperti yang tertera di QS Al-Baqarah ayat 267. Dengan penggunaan batok kelapa sebagai transplantasi terumbu karang sangat memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Namun hal ini berbeda dengan pantai di daerah Karangpuang. Di sana terumbu karang menjadi objek utama dalam pengembangan laut namun dalam menjaga keberlanjutan terumbu karang belum menemukan cara yang tepat. Karena banyaknya terumbu karang yang rusak akibat bom dan tembakan ikan hal ini mengharuskan para nelayan untuk menanam terumbu

karang.⁹⁹ Tetapi jika hanya mengandalkan terumbu karang yang asli akan memakan waktu lama. Oleh karena itu metode *bioreeftek* ini juga bisa di implementasikan di Pantai Karangpuan supaya lebih efisien dan keberlanjutan alam bisa berlangsung dengan tepat. Berbeda dengan Pantai Mutiara, Pantai Cengkong yang letaknya tidak jauh dari Pantai Mutiara dalam pemanfaatan sumber daya alamnya dengan cara pelestarian mangrove.¹⁰⁰ Hal ini menjadi ciri khas masing-masing pantai dengan pelestarian lingkungan sesuai kondisi lingkungannya.

Dengan memanfaatkan laut sebagai tempat wahana *water sport* dan budidaya ikan kerapu dapat meningkatkan pemasukan masyarakat sekitar. Hal yang sama juga terjadi di pantai- pantai yang ada di Bali yakni menjadikan laut sebagai tempat wahana *water sport*. Seperti *jet ski*, *parasailing*, *sea walking*, *wakeboarding*, *surfing*. Berbeda dengan Pantai Mutiara, pantai di Bali lebih banyak memiliki wahana *water sport* karena kondisi pantai yang mendukung seperti memiliki gelombang ombak yang besar membuat adanya wahana *surfing* yang menjadi ciri khas di Bali tidak ada di Pantai Mutiara.¹⁰¹

b. Tidak menggunakan emisi bahan yang berbahaya

Tidak menggunakan emisi bahan yang berbahaya adalah salah satu bentuk menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Apabila dalam

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰ Peran Perguruan Tinggi Dalam Penguatan Pengelolaan Wisata Edukasi et al., “Mangrove Pancer Cengkong’ Kabupaten Trenggalek,” 2020, 954–59, <http://jiat.ub.ac.id>.

¹⁰¹ Ni Nyoman and Ayu Hari, “EVALUASI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN DESA WISATA DI KABUPATEN BADUNG , BALI” 2, no. 1993 (2016): 189–98.

berkegiatan di laut menggunakan emisi bahan yang berbahaya akan merusak ekosistem laut. Para nelayan di Pantai Mutiara dalam penangkapan ikan masih menggunakan metode tradisional seperti pancing, jaring dan di tambah dengan adanya penggunaan rumpon.

Penggunaan alat tradisional seperti pancing, jaring dan rumpon di Pantai Mutiara sesuai dengan tujuan *blue economy* bagian efisiensi alam dengan tidak menggunakan emisi bahan yang berbahaya dan sesuai dengan konsep *fiqh al-bi'ah, haad al-kifayah*. Sama halnya dengan dengan para nelayan di Pantai Kenjeran dalam penangkapan ikan masih menggunakan cara tradisional seperti pancing dan jaring.¹⁰² Berbeda dengan para nelayan di Perairan Kalasey Sulawesi Utara dan Tanjung Samber Biak. Dalam penangkapan ikan dan mengetahui kondisi perikanan di bawah laut sudah menggunakan teknologi *Remotely Operated Vehicle (ROV)*. ROV ini adalah salah satu alat yang menanggulangi keterbatasan manusia di dalam perairan tanpa harus menyelam. Teknologi ini bisa mempermudah para nelayan dalam mencari ikan di laut.¹⁰³ Alat ini bisa menjadi tawaran untuk para nelayan Pantai Mutiara agar lebih mudah untuk mencari ikan dan ekosistem tetap terjaga.

¹⁰² Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam et al., "Implementasi Blue Economy Di Wilayah Pesisir Kenjeran Surabaya."

¹⁰³ T Irza H S Amosir, K Awilarang W A M Asengi, and P Atrice N I K Alangi, "Aplikasi Remotely Operated Vehicle (ROV) Dalam Penelitian Kelautan Dan Perikanan Di Sekitar Perairan Sulawesi Utara Dan Biak Papua" 1, no. 1 (2012): 22–25.

c. Tidak mengganggu dan tidak merusak ekosistem alam

Dalam implementasinya tidak menggunakan emisi berbahaya sebagai salah satu cara agar tidak mengganggu dan merusak ekosistem laut. Dalam hal ini masyarakat Pantai Mutiara sudah menyadari bahwasannya apabila terus menerus menggerus alam dimasa akan datang generasi selanjutnya tidak bisa merasakan kemanfaatan alam.

Dari hasil penelitian bahwasannya yang diimplementasikan di Pantai Mutiara sangat sesuai dengan tujuan *blue economy* melalui prinsip efisiensi alam dengan indikator tidak mengganggu dan tidak merusak ekosistem alam dan sesuai dengan konsep *fiqh al-bi'ah* yang keempat, yakni keselarasan dan keseimbangan ekosistem mutlak harus ditegakkan. Dengan demikian dalam berkegiatan di sekitar pantai perlu memikirkan generasi mendatang tidak hanya memikirkan kesejahteraan masyarakat sesaat namun juga harus memikirkan kelestarian lingkungan untuk jangka panjang. Apabila dalam sehari-harinya nelayan masih menggunakan emisi berbahaya dan melakukan kegiatan lainnya yang dapat merusak ekosistem tanpa memikirkan berlanjutnya ekosistem laut maka generasi yang akan datang tidak akan bisa memanfaatkan alam yang ada dan kelestarian alam tidak berlanjut.¹⁰⁴ Seperti halnya dilakukan oleh Kasdin, salah satu nelayan di wilayah Perairan Taka

¹⁰⁴ Fibrianis Puspita Anhar, "Institutional Management of Mangrove Ecosystems on Small Islands to Support Sustainable Utilization," *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 4, no. 2 (2024): 249–60, <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v4i2.4104>.

dengan sengaja menggunakan bom ikan untuk menangkap ikan.¹⁰⁵ Hal ini menyebabkan kerusakan ekosistem laut yang parah. Oleh karena itu sudah seharusnya dalam pelestariannya pengelola sangat tegas dengan kesehatan ekosistem pantai.

2. *Zero Waste*

Zero waste adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi limbah sampah lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi lingkungan sekitar. Berikut bentuk implementasi *blue economy* prinsip *Zero waste* di Pantai Mutiara Trenggalek:

- a. Meminimalisir dan mengurangi adanya limbah yang diperoleh dari kegiatan ekonomi.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan di daerah wisata Pantai Mutiara pastinya menghasilkan limbah. Hal ini menjadi fokus para pengelola dalam menjaga kebersihan lingkungan pantai. Pengelola Pantai Mutiara sudah meminimalisir sampah yang berserakan dengan menyediakan tempat sampah di beberapa titik dan membedakan organik dan non organik walaupun belum maksimal setidaknya hal tersebut dapat meminimalisir agar sampah yang ada disekitar pantai tidak berserakan.

Implementasi *blue economy* di Pantai Mutiara sudah sesuai dengan tujuan *blue economy* melalui prinsip *zero waste* dengan indikator meminimalisir dan mengurangi adanya limbah yang diperoleh dari

¹⁰⁵ Bahan Peledak, D I Wilayah, and Perairan Taka, "Fishing Using Explosives in the Taka Garas Water Area," 4, no. 4 (2022): 987–96.

kegiatan ekonomi. Hal ini juga sesuai dengan *blue economy* dalam konsep Islam dalam Q.S Al-Baqarah ayat 222 dan H.R at-Tirmizi nomor 2723. Walaupun belum maksimal setidaknya sudah ada upaya dalam meminimalisir sampah yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi di daerah pesisir tersebut. Sama halnya yang dilakukan oleh pengelola di Pantai Kenjeran dan kebanyakan Pantai di Indonesia untuk meminimalisir sampah yang berserakan adalah menyediakan tempat sampah di beberapa sudut pantai.¹⁰⁶ Ini menjadi bukti bahwasannya masyarakat sudah mulai sadar untuk menjaga kebersihan lingkungan.¹⁰⁷

b. Pengelolaan limbah menjadi produk baru yang lebih ekonomis

Pengelolaan limbah menjadi produk baru yang lebih ekonomis merupakan salah satu solusi untuk mengurangi limbah. Namun pada realitanya pengelolaan Pantai Mutiara belum menerapkan hal tersebut. Dalam pengelolaan limbah sampah hanya berhenti di TPS. Seharusnya pengelola dan masyarakat sekitar bisa melakukan pengelolaan limbah menjadi produk baru yang lebih ekonomis.

Dalam indikator ini implementasi yang dilakukan di Pantai Mutiara tidak sesuai dengan tujuan *blue economy* prinsip *zero waste* bagian pengelolaan limbah menjadi produk baru yang lebih ekonomis. Walaupun dalam implementasinya pengelola belum melakukan kegiatan yang dapat mengubah limbah menjadi produk yang lebih ekonomis disisi

¹⁰⁶ Vega Buana, Ayu, and R.Pandin, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip Blue Economy Dan Dampak Pada Masyarakat Di Wilayah Pesisir Kenjeran Surabaya."

¹⁰⁷ Kamal Putra and Asri, "Juridical Review of Blue Economy in Indonesia."

lain mereka sangat peduli dengan kebersihan pantai. Hal ini dibuktikan dengan konsistensi pengelola dalam membersihkan pantai dan membuang sampah ke dalam truk dan dibawa ke TPS. Mengingat TPA yang tempatnya terbatas mengharuskan para masyarakat memiliki paradigma 3R (*Reduse, Reuse, Recycle*). Berangkat dari paradigma seperti ini bisa membuat para masyarakat Pantai Mutiara dapat mengelola sampah menjadi barang yang lebih ekonomis seperti yang dilakukan oleh para masyarakat Desa Jimbaran Bali.¹⁰⁸ Masyarakat di sana bisa mengelola sampah organik menjadi pupuk kompos dan menjadikan botol bekas sebagai pot bunga serta hiasan. Selain itu di Pantai Kenjeranpun memanfaatkan limbah kerang sebagai kerajinan tangan dan menjadikan limbah ikan hasil pengasapan sebagai makanan ikan lele yang dapat diperjual belikan agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan meminimalisir limbah yang ada.¹⁰⁹ Kegiatan ini bisa menjadi inspirasi bagi pengelola Pantai Mutiara untuk melakukan edukasi terkait pembuatan limbah menjadi barang yang lebih ekonomis lalu bisa di terapkan oleh masyarakat agar menambah pendapatan masyarakat sekitar dan meminimalisir limbah.

- c. Berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan Pantai.

¹⁰⁸ I I MADE SUIDARMA, KOMANG DICKY TRI DENIS, and I NYOMAN ARTA YASA, "Pengorganisasian Dan Pengelolaan Sampah Di Pantai Jimbaran," 2022, 213–24.

¹⁰⁹ Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam et al., "Implementasi Blue Economy Di Wilayah Pesisir Kenjeran Surabaya."

Menjaga lingkungan menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab pengelola saja melainkan seluruh masyarakat. Dalam Implementasinya para pengelola Pantai Mutiara bekerja sama dengan stakeholder masyarakat agar selalu mengingatkan masyarakat sekitar untuk tidak membuang sampah ke sungai. Selain itu Pantai Mutiara juga memiliki satu *event* tahunan yang bernama Mutiara *Underwater and Conservation* (MUF ON). *Event* ini adalah kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya sembari memperingati hari lingkungan hidup yang mana dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk mengikuti kegiatan ini. Acara ini meliputi kegiatan seperti pembersihan dasar laut, lomba balap perahu dan penanaman terumbu karang.¹¹⁰

Implementasi *blue economy* yang sudah dilakukan di Pantai Mutiara sesuai dengan tujuan *blue economy* prinsip *zero waste* dengan indikator berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan Pantai dan sesuai dengan *blue economy* konsep Islam pada Q.S Al-Baqarah ayat 30. Jika Pantai Mutiara memiliki event MUF ON pantai Plesengan Banyuwangi memiliki event tahunan yang sama yaitu Festival Pantai Plesengan dalam kegiatan juga bertujuan untuk mengembangkan pariwisata dan upaya memperkenalkan kebersihan pantai adalah sebagai tanggung jawab seluruh elemen

¹¹⁰ UINSA, "MUF ON," 2024, <https://uinisa.ac.id/blog/muf-on-mutiara-underwater-festival-and-conservation-2024>. Di akses pada tanggal 10 November 2024

masyarakat.¹¹¹ Sudah seharusnya semua sadar akan tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan tidak hanya mencari manfaatnya saja dan menganggap bahwasannya menjaga dan merawat lingkungan sekitar hanya tugas pengelola.

3. Inklusivitas Sosial dan Peluang Lapangan Kerja

Inklusivitas sosial dan peluang lapangan kerja yang dimaksud dimana konsep *blue economy* ini bisa menciptakan masyarakat yang setara dan adil serta dapat membuka lapangan kerja. Berikut implementasi *blue economy* dengan menggunakan prinsip inklusivitas sosial dan peluang lapangan kerja di daerah wisata Pantai Mutiara Trenggalek:

a. Terwujudnya kemitraan dengan masyarakat

Adanya kemitraan dengan masyarakat sebagai cara untuk mewujudkan lapangan pekerjaan secara meluas dan memberi kesempatan bagi semua orang berkontribusi dalam kegiatan ekonomi di Pantai Mutiara. Dalam implementasinya di Pantai Mutiara para pemilik warung bermitra dengan pemasok kelapa, makanan dan minuman dari luar wilayah Pantai Mutiara.

Dari hasil penelitian yang dilakukan hal ini sesuai dengan tujuan *blue economy* prinsip inklusivitas sosial yang dapat mewujudkan kemitraan dengan masyarakat luas. Hal yang sama juga dilakukan oleh pengelola wilayah Pesisir KEK Mandalika dalam upaya terwujudnya kemitraan para pengelola berkolaborasi dengan ITDC untuk rutin

¹¹¹ Law Review, "Gorontalo" 5, no. 2 (2022): 412–23.

mengadakan pelatihan kepada para pemuda pemudi seperti pelatihan budidaya jamur tiram.¹¹² Selain itu pengelola di Pantai Kenjeran bermitra dengan komunitas-komunitas usaha kelautan yang dapat membantu usaha masyarakat di sana dari pengepulan sampai pemasaran.¹¹³ Hal ini yang menjadi perbedaan dengan Pantai Mutiara. Pengelola Pantai Mutiara terfokus pada pemasok barang-barang dari luar. Sedangkan di pantai lain bermitra dengan cara bekerjasama dengan komunitas-komunitas usaha dan pelatihan. Pantai Mutiara juga memiliki potensi bermitra dengan komunitas-komunitas usaha nelayan seperti yang dilakukan di Pantai Kenjeran dan Kawasan Pesisir KEK Mandalika. Agar terjalin kemitraan yang lebih baik antar *masyarakat*.

b. Pemberdayaan komunitas lokal

Dalam pelaksanaan implementasi tidak hanya lingkungan yang kita berdayakan dan kita jaga namun SDM yang merawat perlu diberdayakan dan perlu *upgrade* skillnya.

Implementasi *blue economy* di Pantai Mutiara sudah sesuai dengan tujuan *blue economy* prinsip inklusivitas sosial indikator pemberdayaan komunitas lokal. Hal ini menjadi investasi jangka panjang bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan pemberdayaan SDM komunitas lokal para masyarakat bisa menggunakan skill yang didapatkan untuk mengembangkan

¹¹² Adriadi, Afifi, and M, "Pengembangan Kegiatan Ekonomi Berbasis Blue Economy Di Kawasan Pesisir Kek Mandalika."

¹¹³ Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam et al., "Implementasi Blue Economy Di Wilayah Pesisir Kenjeran Surabaya."

peremberdayaan lingkungan pantai dan sudah seharusnya pemerintah memfasilitasi pemberdayaan komunitas lokal dengan bentuk sertifikasi dan pelatihan-pelatihan agar apa yang sudah dipelajari bisa diimplementasikan di lingkungannya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Wahyuddin, Raka Maypangestu dan Tri Ridho bahwasannya ada lima prinsip dasar yang dapat menyeimbangkan sosial, ekonomi dan lingkungan yaitu *people, planet, prosperity, peace and partnership*.¹¹⁴ Salah satunya adalah *people* artinya peran manusia atau SDM ini sangat berpengaruh terhadap keseimbangan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan. Oleh karena itu penting bagi masyarakat dan pengelola untuk memberdayakan komunitas lokal yang ada. Dalam implementasinya di Pantai Mutiara sudah memberdayakan para warga sekitar khususnya anak muda dan para pengelola untuk mengikuti pelatihan. Untuk anak-anak muda yang memiliki potensi di wilayah perhotelan atau anak-anak SMK jurusan perhotelan diberdayakan dengan mengikuti pelatihan perhotelan agar menerapkan manajemen perhotelan untuk mengelola *home stay* di sekitar pantai yang disediakan oleh pemerintah. Selain itu para nelayan juga mewakili Kabupaten Trenggalek untuk mengikuti sertifikasi *diving* yang disediakan oleh pemerintah Provinsi. Hal yang sama juga dilakukan oleh masyarakat Kawasan Pesisir KEK Mandalika bahwasannya disana

¹¹⁴ Y. A. Wahyuddin, Raka Maypangestu Hidayat, and Tri Ridho Verdiansyah, "Strategi Kebijakan Blue Economy Indonesia Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Pada Era Joko Widodo," *Sriwijaya Journal of International Relations* 2, no. 2 (2022): 70–87, <https://doi.org/10.47753/sjir.v2i2.49>.

memberdayakan masyarakatnya dengan berkolaborasi bersama sekolah- sekolah pariwisata dan hotel untuk sarana mengembangkan diri.¹¹⁵ Sama halnya yang dilakukan di Pantai Cemara Lombok Barat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memberdayakan SDM masyarakat seperti pelatihan membuat abon ikan tongkol, terasi udang yang mana dari hasil pelatihan ini bisa langsung diimplementasikan oleh masyarakat sekitar dan menambah penghasilan mereka.¹¹⁶

c. Penciptaan Lapangan Kerja

Penciptaan lapangan kerja di daerah wisata Pantai Mutiara Trenggalek menjadi salah satu tujuan dari konsep *blue economy* yang mana dalam implementasinya tidak hanya kelestarian lingkungan namun kesejahteraan masyarakat juga harus terwujud. Dalam implementasi *blue economy* di Pantai Mutiara membuka lapangan pekerjaan yang banyak bagi masyarakat sekitar. Hal ini dibuktikan dengan adanya usaha warung yang membutuhkan 2- 3 karyawan, penyewaan wahana, penyewaan karpet, karyawan dan pemilik dan karyawan *home stay* serta penjaga tiket sekaligus pengelola.

Implementasi *blue economy* yang baik akan membuka lapangan pekerjaan yang banyak hal ini sesuai dengan tujuan *blue economy* prinsip membuka lapangan kerja dan sesuai dengan *blue economy*

¹¹⁵ Adriadi, Afifi, and M, “Pengembangan Kegiatan Ekonomi Berbasis Blue Economy Di Kawasan Pesisir Kek Mandalika.”

¹¹⁶ Universitas Mataram and Lembar Beach, “Pengembangan Wisata Pantai Melalui Pemberdayaan” 9, no. 1 (2023): 50–68.

dalam konsep Islam seperti yang tertera dalam Q.S At-Taubah ayat 105. Dalam realitanya banyak masyarakat yang terbantu secara ekonomi semenjak adanya Pantai Mutiara ini karena membuka lapangan pekerjaan yang banyak untuk masyarakat hal ini dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Seperti halnya pantai-pantai di Indonesia khususnya di wilayah pesisir seperti Lombok, Bali, NTT dan wilayah pesisir lainnya ketika sudah merapkan konsep *blue economy* dengan baik tidak bisa dipungkiri ini akan menciptakan lapangan kerja yang sangat banyak dan dapat meningkatkan kesejahteraan *masyarakat*.¹¹⁷

4. Keseimbangan antara Produksi dan Konsumsi

Keseimbangan antara produksi dan konsumsi merupakan prinsip *blue economy* yang bertujuan untuk menjaga ekologi, sosial dan ekonomi bisa berjalan bersamaan. Berikut implementasi *blue economy* dengan menggunakan prinsip di daerah wisata keseimbangan antara produksi dan konsumsi Pantai Mutiara Trenggalek:

a. Pengelolaan pantai dengan memperhatikan keberlanjutan ekosistem

Dalam pengelolaan pantai perlu memperhatikan keberlanjutan ekosistem, agar kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat mendatang tetap terjaga. Masyarakat daerah Pantai Mutiara sangat sadar akan pentingnya keberlanjutan ekosistem untuk generasi mendatang

¹¹⁷ Arriyana and Fadjarenie, "Studi Empiris Konsep Sistem Akuntansi Manajemen Strategis Untuk Mendukung Program Blue Economy (Studi Kasus Program Satu Data Kementerian Kelautan Dan Perikanan)."

selain itu para pengelola juga tegas dalam memperhatikan kebersihan pantai.

Implementasi *blue economy* yang dilakukan di Pantai Mutiara sudah sesuai dengan tujuan *blue economy* prinsip keseimbangan antara produksi dan konsumsi indikator pengelolaan pantai dengan memperhatikan keberlanjutan ekosistem selain itu hal ini juga sesuai dengan *blue economy* dalam konsep Islam yang tertera dalam Q.S Al-Isro' ayat 27. Hal ini selaras dengan penelitian dilakukan oleh Smith bahwasannya *blue economy* sangat berkaitan erat dengan keberlanjutan. Tanggungjawab keberlangsungan *blue economy* tidak hanya tentang ekonomi dan politik tetapi secara mendalam terkait dengan tanggung jawab sosial dari institusi untuk menjalankan kewajiban pelayanan publik.¹¹⁸ Apabila terus menguras alam tanpa memikirkan keberlanjutan ekosistem maka kelestarian dan kesejahteraan masyarakatpun akan menurun oleh karena itu seluruh elemen masyarakat perlu memiliki kesadaran penuh untuk tidak serakah dalam memanfaatkan alam dan tetap menjaga keseimbangan antara produksi dan konsumsi agar kelestarian dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.

¹¹⁸ S. Smith-Godfrey, “‘Performance Indicators for the Blue Economy,’ *Australian Journal of Maritime and Ocean Affairs*” 14 (2022): 3.

b. Edukasi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keseimbangan alam di sekitar Pantai

Edukasi dan partisipasi masyarakat menjadi salah satu upaya dalam menjaga keseimbangan alam, karena dalam menjaga kelestarian lingkungan bukan hanya tugas dari pengelola namun juga tugas masyarakat luas tidak hanya orang tua melainkan para remaja, dan juga anak-anak. Dengan demikian adanya edukasi dan partisipasi masyarakat ini menjadi salah satu upaya mencapai tujuan *blue economy*. Para pengelola Pantai Mutiara sudah beberapa kali melakukan edukasi dan sosialisasi ke SD atau bahkan dari SD berkunjung ke pantai untuk melaksanakan *environmental education* dengan para pengelola untuk mengetahui bagaimana caranya melindungi terumbu karang dan pengetahuan tentang *blue economy* lainnya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang diimplementasikan oleh masyarakat daerah Pantai Mutiara sesuai dengan tujuan *blue economy* prinsip keseimbangan antara produksi dan konsumsi indikator edukasi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keseimbangan alam di sekitar Pantai. Sama halnya yang dilakukan oleh pengelola di Pantai Depok Parangtritis dalam edukasi dan partisipasi masyarakat dikelola oleh koperasi wisata bahari yang mana dalam kegiatannya melibatkan seluruh masyarakat untuk peduli dengan lingkungan, membuang limbah cair, daur ulang sampah dan pengadaan

air bersih.¹¹⁹ Namun cara seperti ini tidak terlaksana di Pantai Gedo benar dalam memanfaatkan sumber daya alam memang baik tetapi partisipasi *masyarakat* dalam menjaga ekosistem kurang berjalan dengan lancar.¹²⁰ Hal ini menjadi hambatan dalam keberlanjutan ekosistem. Mungkin apa yang sudah dilakukan oleh pengelola pantai Depok dan Mutiara bisa menjadi contoh bagi pengelolaan untuk meningkatkan partisipasi *masyarakat* dalam menjaga ekosistem. ahwasannya kewajiban untuk menjaga lingkungan bukan hanya tanggung

c. Memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang berjalan tidak merusak lingkungan

Seiring berjalannya waktu Pantai Mutiara mulai ramai dan membuat kegiatan ekonomi di daerah pantai pun semakin banyak, pastinya dari kegiatan ekonomi tersebut menyebabkan limbah dari hasil kegiatan ekonomi. Dapat dipastikan di Pantai Mutiara bahwasannya kegiatan ekonomi yang berjalan tidak merusak lingkungan. Pengelola Pantai Mutiara sudah sangat tegas kepada pemilik usaha dan pengunjung untuk tidak membuang sampah sembarang. Hal ini dibuktikan dengan dikumpulkannya sampah dari pantai secara rutin untuk dibuang ke TPS. Walaupun kurang inovatif sampah yang ada tidak berserakan dan tidak menyebabkan kerusakan ekosistem.

¹¹⁹ Ahmad Nawawi Alumni et al., "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN WISATA PANTAI DEPOK DI DESA KRETEK PARANGTRITIS," *Jurnal Nasional Pariwisata* 5 (2013): 103–9.

¹²⁰ Octovin Lidya Puspaningrum, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Gedo Berbasis Kearifan Lokal" 4, no. 1 (2024).

Implementasi blue economy yang dilakukan Pantai Mutiara sesuai dengan tujuan *blue economy* prinsip keseimbangan antara produksi dan konsumsi indikator memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang berjalan tidak merusak lingkungan selain itu hal ini juga sesuai dengan konsep *fiqh al-bi'ah* yang keempat, yakni keselarasan dan keseimbangan alam mutlak ditegakkkan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Syamsidarti Laming dan Mustamin Rahim menyatakan bahwasannya pada tahun 2020 ikan di laut Ternate sempat mati yang diakibatkan oleh *blooming* alga, di mana ledakan populasi alga mengakibatkan perubahan warna air dan penurunan oksigen. Dinas Lingkungan Hidup Ternate mencatat bahwa limbah organik, termasuk dari pabrik tahu, berkontribusi pada peningkatan nutrisi yang memicu pertumbuhan alga berlebih.¹²¹ Hal ini bisa menjadi pelajaran bagi Pantai Mutiara dan pantai-pantai di Indonesia yang lain untuk tidak membuang sampah ke sungai dan lebih waspada dalam menjaga lingkungan.

5. Inovasi dan Adaptasi Terbuka

Dalam implementasi *blue economy* perlu adanya inovasi dan adaptasi terbuka agar apa yang menjadi tujuan *blue economy* bisa tercapai dengan maksimal. Inovasi dan adaptasi terbuka yang dimaksud yaitu dapat berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan inovasi yang dapat meningkatkan keberlanjutan ekosistem. Seperti pengembangan

¹²¹ Syamsidarti Laming dan MUstamin Rahim, "DAMPAK PEMBANGUNAN PESISIR TERHADAP EKONOMI" 10, no. September (2020): 133–40.

teknologi baru untuk energi terbarukan laut, energi angin lepas dan inovasi dalam Akuakultur yang lebih ramah lingkungan. Dalam implementasinya, Pantai Mutiara belum menemukan inovasi khusus yang berkaitan dengan energi terbarukan karena terhalang oleh dana pemerintah yang terbatas.

Di Indonesia ada beberapa pantai yang sudah menerapkan energi terbarukan diantaranya ada Pantai Baru Bantul dan Pantai Pelengkung Banyuwangi. Pantai-pantai tersebut sudah menerapkan pembangkit listrik tenaga HIBRID yang mana mengandalkan angin dan matahari sebagai sumber energi. Hal ini untuk mengatasi krisis energi listrik di Indonesia.¹²²

Namun dalam implementasi terkait adaptasi terbuka pengelola Pantai Mutiara beradaptasi dengan penggunaan rumpon yang awalnya pemberian dari pemerintah dan ditolak namun sekarang penggunaan rumpon sangat diminati. Karena dengan menggunakan rumpon dapat mempermudah nelayan dalam mencari ikan dan ekosistem laut tetap terjaga. Dari banyaknya nelayan yang ada di Indonesia rata-rata masih menggunakan metode tradisional seperti pancing dan jaring namun juga dibersamai dengan menggunakan rumpon ini.¹²³

Implementasi *blue economy* yang dilakukan di Pantai Mutiara sudah sesuai dengan tujuan *blue economy* prinsip adaptasi terbuka. Dengan respon para nelayan terhadap adanya penggunaan rumpon sebagai bentuk adaptasi

¹²² M.ENG. Tri Suhartanto, Dr. Eng Suharyanto, S.T., “Analisis Kinerja Sistem Pembangkit Listrik Tenaga HIBRID (Angin Dan Surya) Di Pantai Baru Pandasimo Bantul Yogyakarta,” 2024.

¹²³ Chandra, “Implementasi Kebijakan Berbasis Blue Economy Dalam Kerangka Kerja Sama Pemerintah Indonesia Dengan Food And Agriculture Organization (Fao): Studi Mengenai Unit Pengolahan Ikan (UPI) Di Kabupaten Lombok Utara.”

terbuka untuk menyesuaikan strategi dan praktik berdasarkan perubahan kondisi lingkungan dan sosial. Karena dengan hal ini dapat diartikan sebagai penyesuaian metode penangkapan ikan yang dapat mengurangi *overfishing*. Apabila *overfishing* ini terjadi maka populasi ikan akan menurun selain itu juga akan berdampak terhadap keadaan sosial dan ekonomi masyarakat. Pendapatan masyarakat menurun akibat rusaknya ekosistem laut.

B. Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi *blue economy* di daerah wisata Pantai Mutiara Trenggalek

Daerah pesisir menjadi potensi besar bagi masyarakat sekitar untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, hal ini mengharuskan Pantai Mutiara menerapkan konsep *blue economy* untuk menghadapi tantangan yang berkelanjutan serta mengatasi permasalahan ekonomi dan lingkungan. Untuk memaksimalkan dalam implementasinya pasti ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi *blue economy*. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi *blue economy* di daerah wisata Pantai Mutiara Trenggalek:

1. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan menjadi salah satu faktor utama dalam mempengaruhi implementasi *blue economy*. Karena pelestarian lingkungan adalah faktor penting dalam keberlanjutan ekosistem. Dalam implementasi *blue economy* di Pantai Mutiara menyadari bahwasannya dengan lingkungan yang lestari ini mempengaruhi keberhasilan *blue economy*. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Yundari

Amelia, Ismah Rustman, dan Purnami Safitri. Bahwasanya pelestarian lingkungan seperti pengelolaan limbah, sumber daya alam yang berkelanjutan ini sangat berpengaruh pada hasil implementasi *blue economy* berjalan dengan baik atau tidak.¹²⁴

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti menganalisis bahwasannya faktor lingkungan sangat mempengaruhi dalam proses implementasi hal ini juga sesuai dengan tujuan *blue economy* dan *blue economy* dalam konsep Islam yang tertera dalam Q.S Al-Baqarah ayat 30. Karena keberhasilan *blue economy* sangat bergantung pada pelestarian ekosistem laut dan pesisir. Praktik eksploitasi yang tidak berkelanjutan dapat merusak sumber daya ini dan mengancam keberlangsungan *blue economy*. Oleh karena itu seluruh masyarakat wajib turut serta dalam pemeliharaan lingkungan di sekitar pesisir dan laut.

2. Faktor Sosial

Faktor sosial yang memengaruhi implementasi *blue economy* yaitu pemberdayaan masyarakat. Pada faktanya jika masyarakat sekitar berdaya ini akan menjadi investasi panjang bagi lingkungan sekitar, tidak hanya para pengelola saja namun seluruh masyarakat bisa turut untuk membantu dalam proses implementasi *blue economy* di daerah wisata Pantai Mutiara Trenggalek. Dalam implementasinya pengelolaan pantai mutira ditangani oleh mayoritas masyarakat Tasikmadu. Tidak hanya memberdayakan masyarakat untuk

¹²⁴ Ibid.

mengelola pesisir namun juga memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan SDM masyarakat Tasikmadu. Hal yang sama juga dilakukan di Pantai Kenjeran Surabaya, Pantai daerah Losari, dan wilayah Lombok. Selain memberdayakan masyarakat untuk mengelola pantai juga memberikan pelatihan sebagai peningkatan skill masyarakat sekitar.¹²⁵ Dengan keterlibatan masyarakat dalam mengelola pantai menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi *blue economy*.¹²⁶

faktor sosial yang ada di Pantai Mutiara sangat mempengaruhi dalam implementasi *blue economy* hal ini sesuai dengan konsep *blue economy* inklusivitas sosial. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat ini akan memudahkan dalam implementasi *blue economy* Pantai Mutiara dan membuka lapangan pekerjaan yang banyak untuk masyarakat sekitar serta mengurangi pengangguran sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sudah seharusnya ada keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya laut karena ini adalah kunci untuk mendukung implementasi *blue economy*. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan diberi akses terhadap pelatihan serta teknologi.

¹²⁵ Vega Buana, Ayu, and R.Pandin, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip Blue Economy Dan Dampak Pada Masyarakat Di Wilayah Pesisir Kenjeran Surabaya."

¹²⁶ Germond Duret., C, "(In) Justice and The Blue Economy."The Geographical Journal," 2022.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi *blue economy*. Hal ini bisa dilihat dari penggunaan teknologi canggih dan terbarukan serta infrastruktur yang memadai. Dalam implementasinya Pantai Mutiara belum menggunakan teknologi terbarukan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dana dari pemerintah yang terbatas.

faktor ekonomi yang terjadi di Pantai Mutiara bagian teknologi terbarukan tidak sesuai karena belum menggunakan teknologi terbarukan dan canggih. Pada realitanya memang untuk menggunakan teknologi terbarukan dan canggih harus dibersamai dengan pendanaan yang mendukung karena hal ini sangat mempengaruhi dalam implementasi *blue economy*. Sedangkan yang dikeluhkan oleh pengelola Pantai Mutiara yang dapat menghambat penggunaan teknologi adalah pendanaan dari pemerintah yang tidak mencukupi. Jika belum ada penggunaan teknologi terbarukan yang canggih terkadang laut sekitar masih bisa dieksploitasi oleh negara lain dan dalam pengelolaannya juga membutuhkan waktu yang lumayan lama dan menghambat produktivitas usaha berbasis *blue economy*. Jika ada teknologi terbarukan ini akan lebih bisa mengefesien waktu dan alam. Selain itu dalam pengelolaan produktivitas usaha berbasis *blue economy* pun akan berjalan dengan lancar. Teknologi terbarukan juga bisa sebagai investasi jangka

panjang bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Jika ada dana pemerintah yang mencukupi Pantai Mutiara bisa menggunakan teknologi dalam pengembangan *blue economy* seperti penggunaan *fish finder* yang dihubungkan dengan jaringan satelit yang dapat menghemat *route* pelayaran kapal ikan. Ini adalah bentuk tawaran strategi teknologi dalam mendukung implementasi *blue economy* yang diberikan oleh Wulandari Cahyasari dalam penelitiannya.¹²⁷

Selain aspek teknologi, infrastruktur yang memadai juga sangat mempengaruhi keberlangsungan implementasi *blue economy*. Secara infrastruktur jalan daerah Pantai Mutiara sudah sangat memadai selain itu dengan adanya Jalan Lintas Selatan (JLS) Tulungung membuat pengunjung Pantai Mutiara meningkat pesat yang sebelumnya lima bulan hanya 1000-2000 pengunjung sekarang bisa mencapai 5000-6000 pengunjung.

Infrastruktur jalan yang baik ini sangat mempengaruhi implementasi *blue economy*. Hal ini membuat jumlah pengunjung Pantai meningkat pesat dan membuat peningkatan pada kesejahteraan masyarakat dan mempengaruhi perkembangan wisata yang artinya wisata Pantai Mutiara ini dikenal oleh banyak orang.

¹²⁷ Unidad Metodología D E Conocimiento D E Los, "Rani, F., & Cahayasari, W. (2015). Model Blue Economy Di Kawasan Asia Pasifik (Studi Kasus: Penerapan Model Blue Economy Pada Industri Perikanan Indonesia). Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2(1) 1-14." 2, no. 1 (n.d.).

4. Kebijakan dan Regulasi

Kebijakan pemerintah yang mendukung adanya *blue economy* juga sebagai faktor yang memengaruhi implementasi *blue economy*. Selain itu dalam penerapannya pun pengelola Pantai Mutiara sudah memiliki beberapa kebijakan seperti larangan membuang sampah ke sungai, laut, dan membuang sampah sembarangan, selain itu pengelola juga memiliki kebijakan untuk para pemilik usaha bahwasannya tidak boleh melebihi harga barang dari kesesuaian yang sudah ditetapkan oleh pengelola, ketentuan mengenai harga ini biasanya disamakan dengan harga pasaran namun tetap memikirkan keuntungan untuk penjual maupun pembeli, jadi harga barang di warung sekitar Pantai Mutiara memiliki harga yang relatif sama.

Dengan adanya kebijakan dan regulasi ini sangat mempengaruhi dalam proses implementasi *blue economy*. Dengan adanya kebijakan dan regulasi yang ada ini mempermudah pengelola dalam menjaga lingkungan pesisir dan mempermudah dalam menyejahterakan masyarakat .

C. Analisis Dampak *Blue economy* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kelautan

Selama proses implementasi konsep *blue economy* pastinya memiliki dampak khususnya terhadap pertumbuhan ekonomi kelautan daerah wisata Pantai Mutiara Trenggalek. Ekonomi kelautan yang dimaksud yaitu lingkungan sekitar, kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wisata. Hal ini menjadi salah satu acuan apakah *blue economy* yang sudah di implemantasikan dapat berdampak negatif atau positif. Berikut analisis dampak implementasi *blue economy* terhadap ekonomi kelautan di daerah wisata Pantai Mutiara Trenggalek.

a. Dampak *Blue economy* Terhadap Lingkungan sekitar

Dalam implementasi *blue economy* yang sudah diterapkan oleh pengelola Pantai Mutiara dalam menjaga dan memedulikan keberlanjutan ekosistem hal ini berdampak positif terhadap lingkungan sekitar. Implementasi *blue economy* yang sudah di terapkan di Pantai Mutiara seperti transplantasi terumbu karang, menjaga kebersihan pantai, sinergitas antar masyarakat dalam menjaga lingkungan, sadar akan pentingnya keberlanjutan ekosistem. Walaupun beberapa kegiatan yang dilakukan tidak dirasakan manfaatnya secara langsung namun bisa dirasakan dalam jangka panjang. Selama proses implementasi berjalan dalam baik dampak terhadap lingkungan pun akan lebih membaik. Hal ini juga dirasakan oleh beberapa pantai yang sudah menerapkan *blue economy* seperti wilayah Pesisir Gorontalo, Kulon Progo, Pantai

Kenjeran, Pantai yang ada di Wilayah Lombok dan Bali. Bahwasanya dengan menerapkan *blue economy* berdampak baik terhadap lingkungan sekitar membuat lingkungan terlihat lebih asri dan berkelanjutan.¹²⁸

Dari pernyataan di atas peneliti menganalisis bahwasannya hal ini sesuai dengan tujuan *blue economy* dan berdampak positif terhadap lingkungan sekitar. Karena kelestarian lingkungan bisa terjaga selain itu kesejahteraan masyarakat juga terjamin. Melihat manfaat jangka panjang dengan adanya transplantasi terumbu karang menggunakan metode *bioreeftek* ini sangat mempermudah keberlanjutan ekosistem seperti menjadi rumah bagi biota laut selain itu para nelayan juga mudah mendapatkan ikan dan dalam jangka panjang terumbu karang ini bisa dimanfaatkan sebagai tujuan *snorkling* untuk para pengunjung. Dengan adanya implementasi *blue economy* yang ramah lingkungan dapat membuat ekosistem laut lebih terjaga.

b. Dampak *blue economy* terhadap kesejahteraan masyarakat

Blue economy tidak hanya berfokus pada kelestarian lingkungan saja namun dalam konsep *blue economy* ini juga berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Dalam pengimplementasi *blue economy* pastinya ada manfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal ini dibuktikan dengan menerapkan *blue economy* di daerah wisata Pantai Mutiara membuka lapangan kerja yang banyak dan hal ini dapat meningkatkan

¹²⁸ Ibid.

perekonomian *masyarakat* sekitar. Dari pekerjaan yang sebelumnya hanya nelayan kini bisa memiliki warung, menjadi karyawan warung, penjaga tiket sampai menjadi penyewa wahana. Hal ini juga dibuktikan dari penghasilan masyarakat sekitar yang penghasilan sebelumnya hanya sekitar 3-5 juta namun sekarang bisa mencapai 6-8 juta perbulan. Selain itu kas lingkungan pun bertambah yang sebelumnya sama sekali tidak memiliki kas lingkungan, sedangkan kini kas lingkungan bisa mencapai 25 juta bersih per tahun. Hal ini juga dirasakan oleh *masyarakat* wilayah pesisir KEK Mandalika bahwasannya dampak dari implementasi *blue economy* membawa kesejahteraan bagi masyarakat yang mana di sana akhirnya memiliki banyak usaha selain itu alam yang sangat indah menjadi tujuan utama para pengunjung.¹²⁹

Dari pernyataan di atas peneliti menganalisis bahwasannya implementasi *blue economy* di daerah wisata Pantai Mutiara berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan ini sesuai dengan tujuan *blue economy*. Dengan ini tidak hanya kelestarian lingkungan yang menjadi fokus namun kesejahteraan masyarakat bisa terjamin. Dalam implementasi *blue economy* membuat masyarakat sangat sejahtera karena adanya lapangan pekerjaan yang begitu banyak hal ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Karena awalnya mata pencaharian masyarakat sekitar hanya nelayan namun dengan adanya

¹²⁹ Adriadi, Afifi, and M, "Pengembangan Kegiatan Ekonomi Berbasis Blue Economy Di Kawasan Pesisir Kek Mandalika."

pantai yang dikelola dengan konsep *blue economy* ini bisa menghasilkan sumber mata pencaharian bermacam-macam dan dapat mensejahterakan masyarakat.

c. Dampak *blue economy* terhadap pengembangan wisata

Implementasi *blue economy* yang menekankan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat memiliki peran penting dalam pengembangan sektor pariwisata. Dengan memanfaatkan keindahan alam konsep ini tidak hanya tentang pelestarian lingkungan namun juga dapat menciptakan peluang ekonomi yang signifikan. Dari peluang ekonomi yang terciptakan dapat membuat wisata bahari yang berkelanjutan. Dengan adanya konservasi laut dan inovasi *bioreeftek* di Pantai Mutiara membuat peluang wisata baru seperti ada *snorkeling* untuk melihat terumbu karang dan ikan-ikan kecil yang berkumpul di dekat terumbu karang, selain itu juga ada penyewaan *speed boat*, *banana boat* untuk merasakan indahnya pantai.

Dari pernyataan di atas peneliti menganalisis bahwasannya implementasi *blue economy* yang ada di Pantai Mutiara sesuai dengan prinsip *blue economy* yang berdampak positif terhadap pengembangan wisata di daerah wisata Pantai Mutiara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pengunjung yang biasanya hanya 1000- 2000 pengunjung menjadi 5000- 6000 pengunjung per lima bulannya terlebih ketika hari libur. Selain itu dengan melibatkan komunitas lokal dalam pengelolaan dan penyediaan layanan wisata, *blue economy* juga

membantu memberdayakan masyarakat, memperkuat budaya lokal, dan menciptakan rasa kepemilikan terhadap sumber daya alam. Dengan pendekatan yang tepat, *blue economy* berpotensi untuk menciptakan industri pariwisata yang indah, tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan laut untuk generasi mendatang.¹³⁰



¹³⁰ Khusniati Rofi'ah and Moh Munir, "Jihad Harta Dan Kesejahteraan Ekonomi Pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber," *Justicia Islamica* 16, no. 1 (2019): 193–218, <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1640>.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwasannya:

1. Implementasi *blue economy* di Daerah wisata Pantai Mutiara Trenggalek sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya seluruh prinsip *blue economy* yaitu efisiensi alam, *zero waste*, inklusivitas sosial dan peluang lapangan kerja, keseimbangan antara produksi dan konsumsi dan inovasi dan adaptasi terbuka sudah terimplementasi dalam mengelola Pantai Mutiara Trenggalek. Walaupun teknologi terbarukan dan pengelolaan limbah untuk menjadi produk yang lebih ekonomis belum terlaksana namun hal tersebut tidak menjadikan penghambat bagi pengelola dalam mengimplementasikan *blue economy* di daerah wisata Pantai Mutiara Trenggalek.
2. Ada 4 faktor yang mempengaruhi implementasi *blue economy* di daerah wisata Pantai Mutiara Trenggalek. Pertama, faktor lingkungan, faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap implementasi *blue economy* di Pantai Mutiara, karena keberhasilan *blue economy* sangat bergantung pada pelestarian ekosistem laut dan pesisir. Praktik eksploitasi yang tidak berkelanjutan dapat merusak sumber daya ini dan mengancam keberlangsungan *blue economy*. Kedua, Faktor sosial dengan memberdayakan masyarakat sekitar dapat mendukung implementasi *blue economy* di Pantai Mutiara. Ketiga, faktor ekonomi aspek teknologi terbarukan di Pantai Mutiara belum menerapkan karena kurangnya dana dari pemerintah, hal ini

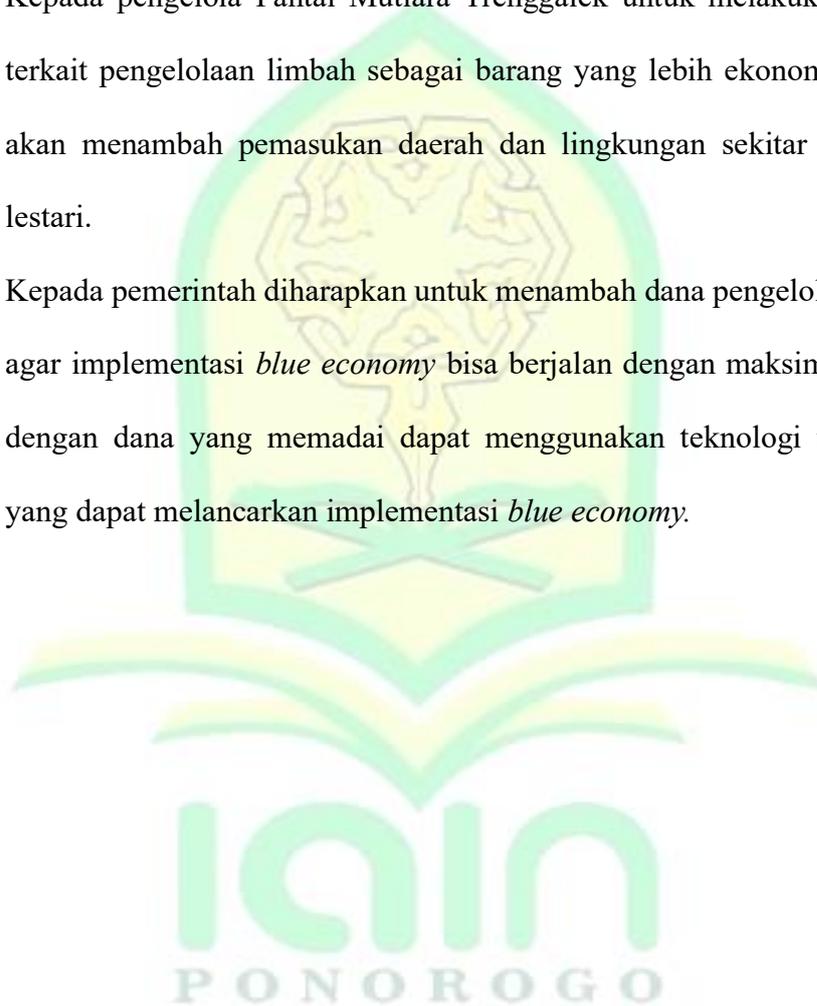
menghambat proses implementasi *blue economy* di Pantai Mutiara. Namun dalam aspek infrastruktur Pantai Mutiara sudah memiliki infrastruktur jalan yang memadahi hal ini sangat membantu dalam implementasi *blue economy*. Keempat, kebijakan dan regulasi adalah faktor yang sangat berperan penting dalam implementasi *blue economy*. Pengelola Pantai Mutiara sudah menggunakan kebijakan pemerintah sesuai aturan selain itu pengelola juga membuat kebijakan untuk menjaga kebersihan pantai dan kenyamanan serta kesejahteraan *masyarakat*.

3. Ada 3 dampak implementasi *blue economy* terhadap pertumbuhan ekonomi kelautan yakni berdampak positif terhadap lingkungan sekitar, kesejahteraan *masyarakat* dan pengembangan pariwisata di sana. Hal ini dibuktikan dengan adanya implementasi *blue economy* yang ramah lingkungan yang dapat membuat ekosistem laut terjaga selain itu dapat membuka lapangan pekerjaan yang banyak salah satunya untuk mengelola tiket saja dibutuhkan 20 orang. Selain itu Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kas lingkungan yang mencapai 25 juta bersih pertahunnya dan pendapatan *masyarakat* yang meningkat dari 3-5 juta perbulan menjadi 6-8 juta perbulan dan mengurangi pengangguran. Serta dalam implementasi *blue economy* memberi dampak yang positif terhadap perkembangan wisata Pantai Mutiara seperti menciptakan industri pariwisata yang indah dan meningkatnya pengunjung dari tahun ke tahun, yang sebelumnya hanya 1000-2000 pengunjung namun sekarang bisa mencapai 5000-6000 per bulannya.

B. SARAN

Saran merupakan suatu masukan yang disusun untuk menyempurnakan hasil dari penelitian. Setelah peneliti mengkaji landasan teori, serta melakukan penelitian tersebut, penulis memberikan saran yang berlaku sebagai masukan bagi pihak terkait yang menjadi objek penelitian.

1. Kepada pengelola Pantai Mutiara Trenggalek untuk melakukan inovasi terkait pengelolaan limbah sebagai barang yang lebih ekonomis, hal ini akan menambah pemasukan daerah dan lingkungan sekitar bisa lebih lestari.
2. Kepada pemerintah diharapkan untuk menambah dana pengelolaan pantai agar implementasi *blue economy* bisa berjalan dengan maksimal, karena dengan dana yang memadai dapat menggunakan teknologi terbaru yang dapat melancarkan implementasi *blue economy*.



DAFTAR PUSTAKA

- Adibrata, Sudirman, Rahmad Lingga, and Mohammad Agung Nugraha. "Penerapan Blue Economy Dengan Budidaya Udang Vaname (*Litopenaeus Vannamei*)." *Journal of Tropical Marine Science* 5, no. 1 (2022): 45–54. <https://doi.org/10.33019/jour.trop.mar.sci.v5i1.2964>.
- Adriadi, Gina Sonya, Mansur Afifi, and Baiq Saripta W. M. "Pengembangan Kegiatan Ekonomi Berbasis Blue Economy Di Kawasan Pesisir Kek Mandalika." *Jurnal Konstanta* 1, no. 1 (2022): 1–10. <https://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/konstanta/article/view/160>.
- Adzin, Urwatil, Muhammad suyuti, La, and Ili Hurriyati. "Implementasi Blue Economy Di Wilayah Pesisir Ampenan Kecamatan Ampenan Kota Mataram," n.d., 85–90.
- Al- Qur'an, 11:34.*, n.d.
- Al- Qur'an, 17:27.*, n.d.
- Al- Qur'an, 2:222.*, n.d.
- Al- Qur'an, 2:267.*, n.d.
- Al- Qur'an, 67 :19,* n.d.
- Al- Qur'an, 9:105.*, n.d.
- Al- Qur'an,2:34,* n.d.
- Alumni, Ahmad Nawawi, Kajian Pariwisata, Sekolah Pascasarjana, and Gadjah Mada. "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN WISATA PANTAI DEPOK DI DESA KRETEK PARANGTRITIS." *Jurnal Nasional Pariwisata* 5 (2013): 103–9.
- Amosir, T Irza H S, K Awilarang W A M Asengi, and P Atrice N I K Alangi. "Aplikasi Remotely Operated Vehicle (ROV) Dalam Penelitian Kelautan Dan Perikanan Di Sekitar Perairan Sulawesi Utara Dan Biak Papua" 1, no. 1

(2012): 22–25.

Anggor, M Toha. “Metode Penelitian.” *Jakarta: Universitas Terbuka*, 2008.

Anhar, Fibrianis Puspita. “Institutional Management of Mangrove Ecosystems on Small Islands to Support Sustainable Utilization.” *Niqosiya: Journal of Economics and Bussiness Research* 4, no. 2 (2024): 249–60. <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v4i2.4104>.

Arriyana, Dhina, and Agustin Fadjarenie. “Studi Empiris Konsep Sistem Akuntansi Manajemen Strategis Untuk Mendukung Program Blue Economy (Studi Kasus Program Satu Data Kementerian Kelautan Dan Perikanan).” *Jurnal Kelautan Nasional* 18, no. 1 (2023): 43. <https://doi.org/10.15578/jkn.v18i1.12369>.

Azizah, Lailatul. “Implementasi Blue Economy Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada TPI Brondong)” 06, no. September (2023): 101–22.

Banu, Nota Morra. “Konsep Blue Economy Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Indonesia.” *Ekonis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 22, no. 1 (2020): 27–31. <https://doi.org/10.30811/ekonis.v22i1.1907>.

Belitung, Agro Bangka, Sudirman Adibrata, Rahmad Lingga, Siti Fatimah, Program Studi, Manajemen Sumberdaya, Fakultas Pertanian, Pokdakan Mina, and Berkah Mandiri. “Abdimas Galuh IMPLEMENTATION OF BLUE ECONOMY BY MANAGING PRAWN POTENCY ON THE FRESHWATER THROUGH ASSISTING COMPARATIVE STUDY OF Usaha Mikro Kecil Menengah Strategic Trade Center Agromaritim (UMKM STC” 4, no. September (2022): 1140–51.

BPK Jawa Ttimur. “,” 2023. <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-trenggalek/>.

bps trenggalek. “Letak Geografis Kabupaten Trenggalek,” n.d. <https://trenggalekkab.bps.go.id/statictable/2020/01/30/365/keadaan-geografis-dan-batas-administrasi-wilayah-kabupaten-trenggalek-2017.html>.

- Chandra, Yundari Amelia. "Implementasi Kebijakan Berbasis Blue Economy Dalam Kerangka Kerja Sama Pemerintah Indonesia Dengan Food And Agriculture Organization (Fao): Studi Mengenai Unit Pengolahan Ikan (UPI) Di Kabupaten Lombok Utara." *Indonesian Journal of Global Discourse* 3, no. 1 (2021): 1–19. <https://doi.org/10.29303/ijgd.v3i1.27>.
- Dian, Ardhina, Islamiati Adnan, Sitti Hasana, and Mahfud Assidiq. "Implementasi Konsep Blue Economy Di Indonesia Dengan." *Sensistek* 6, no. 2 (2023): 134–40.
- Duret., C, Germond. "(In) Justice and The Blue Economy." *The Geographical Journal*, 2022.
- Economy, EU Blue. "No Title," n.d. https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news-and-updates/eu-blue-economy-innovation-and-new-opportunities-make-way-green-transition-2024-05-30_en.
- Efendi, Mohamad Nur, Kusnul Ciptanila Yuni K, Iza Hanifuddin, and Arian Agung Prasetyawan. "Omnibus Law Sentiment and Its Impact on The Halal Certification Program in Indonesia." *Justicia Islamica* 20, no. 1 (2023): 37–58. <https://doi.org/10.21154/justicia.v20i1.5829>.
- Eni. "MODEL COMPONENTS OF MANGROVE RESOURCES MANAGEMENT BASED ON BLUE ECONOMY CONCEPT." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 04, no. Mi (1967): 5–24.
- Ermanto. "Wawancara 4 Juni 2024," n.d.
- Fahrurrozi, Fahrurrozi. "Analysis Concept of The Blue Economy Islamic Perspective (Case Studi Jumiang as Marine Tourism in Pamekasan)." *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal* 4, no. 1 (2020): 17. <https://doi.org/10.21070/perisai.v4i1.435>.
- Ghufron, Muhammad. "Fikih Lingkungan." *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam* 10, no. 1 (2010): 159–76.

Gunawan. “Wawancara 21 Mei 2024,” n.d.

Hartati, Nurul. “DALAM MENDUKUNG BLUE ECONOMY DI KABUPATEN LUWU TIMUR (Studi Kasus Masyarakat Pesisir Kecamatan Malili) DI KABUPATEN LUWU TIMUR (Studi Kasus Masyarakat Pesisir Kecamatan Malili),” 2023.

Hayati, Mir’atul, and Fernaldi Anggadha Ratno. “The Urgency of Blue and Green Economy, Internalization, and Infrastructure, In The SDGS.” *Annual International Conference on Islamic Economics and Business (AICIEB)* 3 (2023): 105–17.

IMADE SUIDARMA, I, KOMANG DICKY TRI DENIS, and I NYOMAN ARTA YASA. “Pengorganisasian Dan Pengelolaan Sampah Di Pantai Jimbaran,” 2022, 213–24.

Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi, Uin Sunan Ampel Surabaya Jl Ahmad Yani, Jawa Timur, Hani Mukaromah, and Lilik Rahmawati. “Implementasi Blue Economy Di Wilayah Pesisir Kenjeran Surabaya.” *OECONOMICUS Journal of Economics* 7, no. 2 (2023).

Isdarsono. Wawancara 21 Mei 2024 (n.d.).

Kamal Putra, Muhammad Na’afil, and Muhammad Farhan Asri. “Juridical Review of Blue Economy in Indonesia.” *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 3, no. 1 (2023): 123. <https://doi.org/10.19184/jkph.v3i1.37211>.

Latifah, Eny. “Fiqh Al-Bī’ah and the Concept of Green and Blue Economy for Achieving Sustainable Development in the Context of SDGs.” *Invest Journal of Sharia & Economic Law* 4, no. 1 (2024): 74–99. <https://doi.org/10.21154/invest.v4i1.7732>.

Lee, Ki Hoon, Junsung Noh, and Jong Seong Khim. “The Blue Economy and the United Nations’ Sustainable Development Goals: Challenges and Opportunities.” *Environment International* 137, no. January (2020): 105528. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105528>.

- Los, Unidad Metodología D E Conocimiento D E. “Rani, F., & Cahayasari, W. (2015). Model Blue Economy Di Kawasan Asia Pasifik (Studi Kasus: Penerapan Model Blue Economy Pada Industri Perikanan Indonesia). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 2(1) 1-14.” 2, no. 1 (n.d.).
- Mataram, Universitas, and Lembar Beach. “Pengembangan Wisata Pantai Melalui Pemberdayaan” 9, no. 1 (2023): 50–68.
- Narwal, Sahil, Manpreet Kaur, Digvijay Singh Yadav, and Felix Bast. “Sustainable Blue Economy: Opportunities and Challenges.” *Journal of Biosciences* 49, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.1007/s12038-023-00375-x>.
- Nisak, Khoirun. “Cash Waqf Linked Blue Sukuk: An Analysis of Fiqh Al-Biah.” *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 5 (2023): 163–68.
- Nurdiana. “Strategi Pengembangan Agroindustri Perikanan Laut Di Kawasan Pesisir Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi (Pendekatan Konsep Blue Economy).” *Digital Repository Universitas Jember*, no. September 2019 (2021): 2019–22.
- Nursita, Lisa, and Fakultas Tarbiyah. “Menggagas Pembangunan Blue Economy Terumbu Karang ; Sebuah Pendekatan Sosial Ekonomi EcceS : Economics Social and Development Studies Abstrak : Menggagas Pembangunan Blue Economy Terumbu Abstract : Initiating Development Blue Economy of Coral Reef;” 7 (2020): 62–86. <https://doi.org/10.24252/ecc.v7i1.13730>.
- Nyoman, Ni, and Ayu Hari. “EVALUASI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN DESA WISATA DI KABUPATEN BADUNG , BALI” 2, no. 1993 (2016): 189–98.
- “Pantai Mutiara Ditarget Masuk Blue Economy.” Accessed September 19, 2023. <https://harian.disway.id/read/686014/pantai-mutiara-ditarget-masuk-blue-economy>.

- Pauli, Gunter. *Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs*. United States: paradigm publication, 2010.
- Peledak, Bahan, D I Wilayah, and Perairan Taka. "Fishing Using Explosives in the Taka Garas Water Area ," 4, no. 4 (2022): 987–96.
- Peraturan, Implementasi. "5539-19793-1-Pb" 3, no. 1 (2023): 18–34.
- Perguruan Tinggi Dalam Penguatan Pengelolaan Wisata Edukasi, Peran, Pudji Purwanti, Teguh Utomo, Erlinda Indrayani, and dan Mochammad Fattah. "Mangrove Pancer Cengkong' Kabupaten Trenggalek," 2020, 954–59. <http://jiat.ub.ac.id>.
- Perikanan, Dinas. "Kebijakan Ekonomi Biru," 2023.
- "Pertumbuhan Ekonomi Kelautan," n.d. <https://pksp1.ipb.ac.id/kelautan-sebagai-sumber-pertumbuhan-ekonomi-baru-2/>.
- Prasetyo, Luhur, and Khusniati Rofiah. "The Formulation of Islamic Bank Performance Based on Contemporary Maqasid Al-Sharia." *Justicia Islamica* 18, no. 2 (2021): 318–34. <https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.3163>.
- Prof.Dr.Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, 2021.
- Program, Alumni, and Studi Hubungan. "PROSES KERJASAMA INTERNASIONAL ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN PEMERINTAH PERANCIS UTARA DALAM MENERAPKAN KONSEP ' BLUE ECONOMY ' DI KAWASAN MADURA KABUPATEN SAPEKE Ichwan Haryanto" 3, no. 1 (2015): 13–31.
- Puspaningrum, Octovin Lidya. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Gedo Berbasis Kearifan Lokal" 4, no. 1 (2024).
- Rahim, Syamsidarti Laming dan MUstamin. "DAMPAK PEMBANGUNAN PESISIR TERHADAP EKONOMI" 10, no. September (2020): 133–40.
- Review, Law. "Gorontalo" 5, no. 2 (2022): 412–23.

- Rofi'ah, Khusniati, and Moh Munir. "Jihad Harta Dan Kesejahteraan Ekonomi Pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber." *Justicia Islamica* 16, no. 1 (2019): 193–218. <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1640>.
- Rohmanu, Abid, and Khusniati Rofiah. "Tāhā 'Abd Al-Raḥmān's Philosophical Contribution to Theorize Ethical Maqāṣid." *Al-Ahkam* 33, no. 2 (2023): 185–206. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.2.17527>.
- Siti Marwiyah, Nurul Jannah Lailatul Fitria. "The Urgency of Blue Economy-Based Sustainable Development Education in Higher Education (Study Blue Economy Education in Probolinggo)" 8, no. 3 (2022): 643–54.
- Sjarief Widjaja. *Telaah Akademik: Perspektif Pembangunan Ekonomi Kelautan*, 2021. <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/amafrad/issue/view/825>.
- Smith-Godfrey, S. "'Performance Indicators for the Blue Economy,' Australian Journal of Maritime and Ocean Affairs" 14 (2022): 3.
- Sugeng. Wawancara, 21 Juni 2024 (n.d.).
- . Wawancara 06 November 2024 (n.d.).
- . "Wawancara 21 Mei 2024," n.d.
- Sukarniati, Lestari, and Rifki Khoirudin. "Analisis Kelembagaan Penerapan Konsep Blue Economy Pada Tambak Udang (Studi Kasus Di Dusun Ngentak Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul)." *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo* 3, no. 2 (2017): 52–65. <https://doi.org/10.35906/jep01.v3i2.198>.
- Transnasional, Jurnal. "Motivasi Indonesia Dalam Menerapkan Model Kebijakan" 7, no. 1 (2015): 1914–28.
- Tri Suhartanto, Dr. Eng Suharyanto, S.T., M.ENG. "Analisis Kinerja Sistem Pembangkit Listrik Tenaga HIBRID (Angin Dan Surya) Di Pantai Baru Pandasimo Bantul Yogyakarta," 2024.

UINSA. "MUF ON," 2024. <https://uinsa.ac.id/blog/muf-on-mutiara-underwater-festival-and-conservation-2024>.

Vega Buana, Amelia, Nouva Ayu, and Maria Yovita R.Pandin. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip Blue Economy Dan Dampak Pada Masyarakat Di Wilayah Pesisir Kenjeran Surabaya." *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Perencanaan Kebijakan* 1, no. 4 (2024): 1–12. <https://doi.org/10.47134/jampk.v1i4.334>.

Wahyudi, Amin, Binti Nur Asiyah, and Husnul Haq. "The Urgency of Sharia Division in Indonesian and Malaysian Islamic Bank." *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 7, no. 1 (2023): 82–94. <https://doi.org/10.26740/aluqud.v7n1.p82-94>.

Warno. Wawancara 21 Mei 2024 (n.d.).

Wiratma, Harits Dwi, and Tanti Nurgiyanti. "Pembangunan Pariwisata Kulon Progo Melalui Konsep Green Economy Dan Blue Economy." *Nation State Journal of International Studies* 2, no. 2 (2019): 161–72. <https://doi.org/10.24076/nsjis.2019v2i2.164>.

Y. A. Wahyuddin, Raka Maypangestu Hidayat, and Tri Ridho Verdiansyah. "Strategi Kebijakan Blue Economy Indonesia Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Pada Era Joko Widodo." *Sriwijaya Journal of International Relations* 2, no. 2 (2022): 70–87. <https://doi.org/10.47753/sjir.v2i2.49>.

Yahya, Fiki Andrean, and Nasrulloh. "The Relevance of Maqashid Sharia in Green Economy (Study of Coastal Tourism Area Mangrove Park Labuhan, Bangkalan-Madura)." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum ...* 8, no. 2 (2022): 12–22. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/731%0Ahttps://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/download/731/601>.

Zaputra, Reo. "KAJIAN PENGEMBANGAN SEKTOR PERIKANAN DI

KABUPATEN SAMBAS” 1, no. 5 (2023): 728–37.

